

DINAS TENAGA KERJA  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA MALANG

[Bizagi Modeler](#)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini sebagai bagian implementasi dari area perubahan penataan tatalaksana pada reformasi birokrasi yaitu adanya dokumen Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam upaya mencapai kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat pada dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk segala saran, kritikan dan masukan yang bersifat perbaikan sangat diharapkan.

Semoga dokumen ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja yang ideal.

Malang, Februari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**ARIF TRI SASTYAWAN, S, STP, M. SI**  
**Pembina Tingkat I / IV-b**  
**NIP. 19790709 199810 1 001**

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Reformasi birokrasi dilakukan untuk melaksanakan perubahan sistematis dan terencana. Mencapai tatanan administrasi instansi pemerintahan yang baik, dan menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki sikap profesional, efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan terciptanya *good governance*. *Good governance* ini menjadi syarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan cita – cita bangsa dan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman berbasis elektronik diperlukan standarisasi proses bisnis yang terintegrasi berbasis elektronik.

Proses reformasi birokrasi dilakukan terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam instansi pemerintahan agar semakin baik dengan peningkatan efektivitas serta efisiensi birokrasi yang mengacu pada proses bisnis yang dijalankan oleh birokrasi untuk menghasilkan *output* serta *outcome*. Proses bisnis yang tidak mengacu pada hasil dan tidak dapat terukur antar satu organisasi dengan unit organisasi lainnya akan berdampak pada hasil pelaksanaan program serta kegiatan yang tidak optimal. Oleh sebab itu, unit organisasi membutuhkan peta proses bisnis yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan salah satu aset yang penting dalam suatu organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi mengenai organisasi tersebut ke dalam suatu bentuk dokumen atau database organisasi. Peta proses bisnis menjadi kebutuhan dan keperluan yang melibatkan setiap elemen di dalam suatu organisasi. Proses penyusunan peta proses bisnis dapat memastikan akurasi serta kelengkapan dari proses bisnis yang sudah digambarkan dalam peta proses bisnis sesuai rencana strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

## II. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
- b. Untuk menciptakan komunikasi yang baik antar pihak internal maupun pihak eksternal mengenai proses bisnis yang akan dijalankan sehingga mencapai visi, misi dan tujuan
- c. Untuk dijadikan aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis. Aset pengetahuan ini dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam proses pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja

Adapun manfaat dari peta proses bisnis sebagai berikut ini :

- a. Memudahkan dalam melihat potensi dari suatu permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu proses bisnis didalam suatu organisasi sehingga dapat menghasilkan solusi yang terarah untuk penyempurnaan proses bisnis
- b. Menjadi suatu standar dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehingga akan mempermudah dalam mengendalikan serta mempertahankan kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan.

## III. Ruang Lingkup

Pembuatan serta penyusunan peta proses bisnis ini dilakukan oleh seluruh perangkat daerah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis meliputi kegiatan yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Malang sesuai dengan dokumen rencana strategis serta rencana kerja organisasi.

# SK PENETAPAN PETA PROSES BISNIS



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : [disnakerpmptsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmptsp@malangkota.go.id)

**MALANG**

Kode Pos 65132

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA MALANG**

**NOMOR: 188.45/03 /35.73.406/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETA PROSES BISNIS**

**PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/354/KPTS/013/2021 Tentang Peta Proses Bisnis Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Peta Proses Bisnis pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Peta Proses Bisnis pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
MALANG  
NOMOR : 188.45/ O3 /35.73.406/2023  
TENTANG PENETAPAN PETA PROSES  
BISNIS PADA DINAS TENAGA KERJA,  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

## PETA PROSES BISNIS

- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi dan pola hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Bagian di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 4 Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199810 1 001

**DISNAKER, PM-PTSP**

Manjerial



P6 bagian umum dan kepegawaian



P7 jabatan fungsional ( analisis keuangan, Analisis perencanaan muda)

Utama



P1 Ketenagakerjaan



P2 Pengembangan iklim dan Penanaman Modal



P3 Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi



P4 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata, dan Sosial Budaya



P5 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum

Disnaker PMPTSP



P8 Pertimbangan & Rekomendasi Pemberian Perizinan ( dinas terkait)



P9 Koordinasi Pelayanan Perlindungan (BP2MI,P3MI, CPMI / PMI)



P10 Fasilitasi dan Rekomendasi (BLK PROVINSI)



P11 Koordinasi dan Mediasi Upah dan HI (SERIKAT PEKERJA, ASOSIASI PENGUSAHA)



P12 Publikasi ( MEDIA MASA )



P13 Kemitraan dan Kerjasama (TRIPARTIT, DEWAN PENGUPAHAN)



P14 Kebijakan, Pembinaan, dan Konsultasi (MASYARAKAT, BPJS KETENAGAKERJAAN)



P15 Pengawasan (PENGAWAS PROVINSI)



P16 Promosi (PELAKU USAHA, DPMPPTSP PROV)



P17 Kebijakan ( DPMPPTSP PROV, DINAS TERKAIT )



P18 Pengendalian ( BIDANG TERKAIT, DPMPPTSP PROV,BKPM)



P19 Pengaduan ( DINAS TERKAIT )

Lainnya



P20 Data dan Informasi ( KOMINFO, BPS, BAPPEDA )



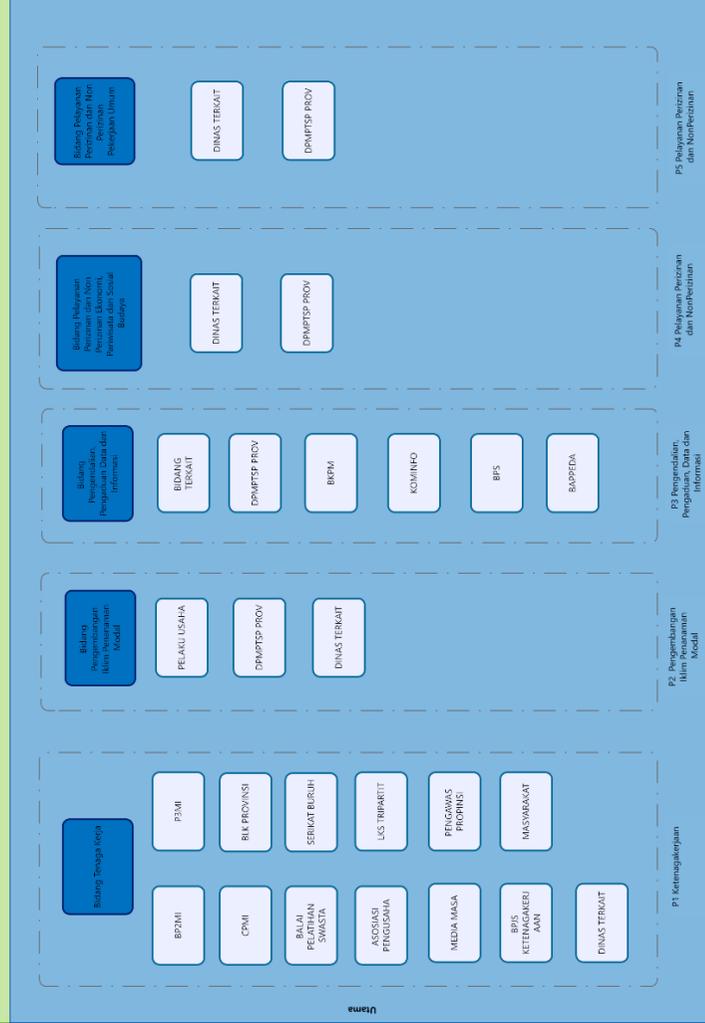
P21 Perizinan dan Nonperizinan ( DINAS TERKAIT, DPMPPTSP PROV )



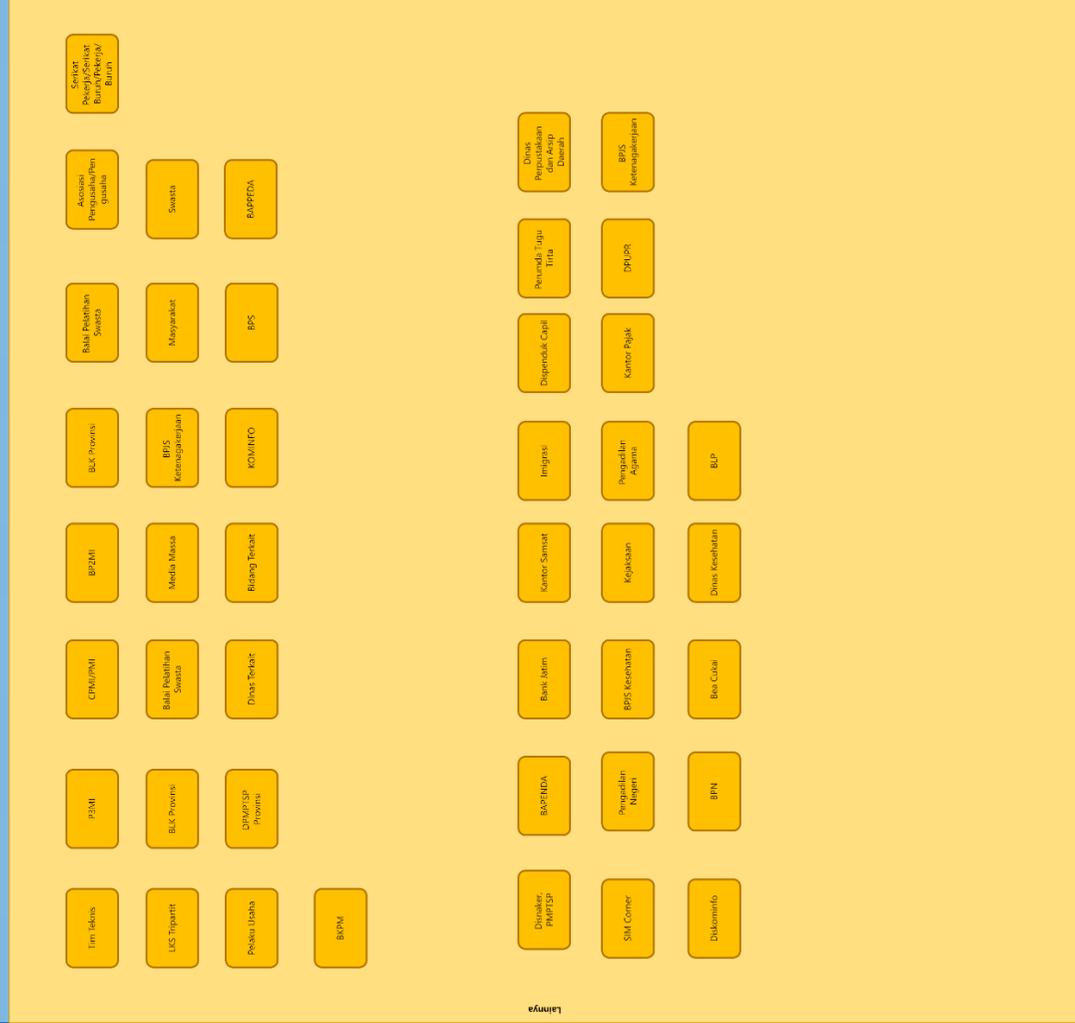
P22 Perizinan dan Nonperizinan ( DINAS TERKAIT, DPMPPTSP PROV )



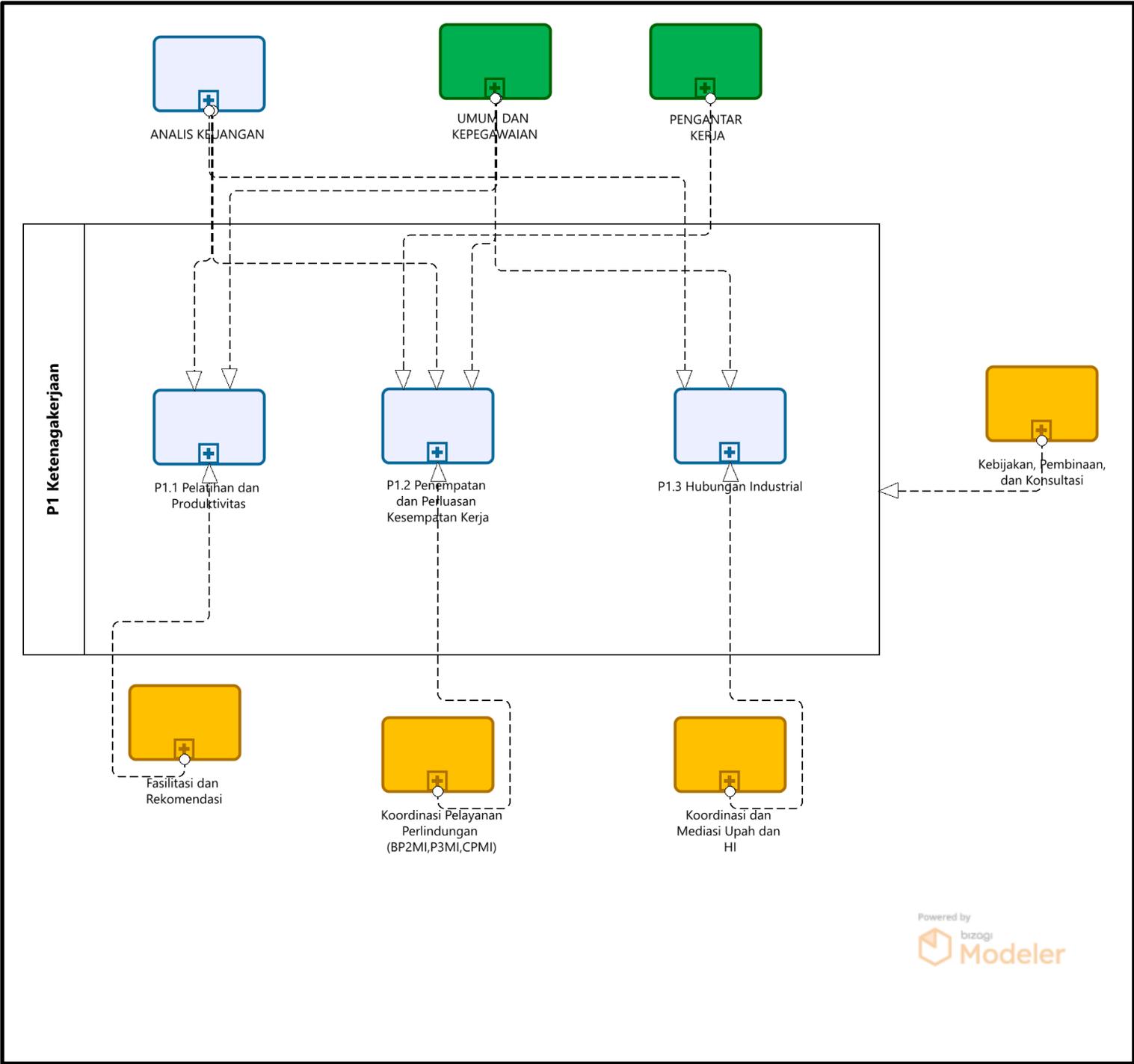
P23 MPP ( 24 TENAN )

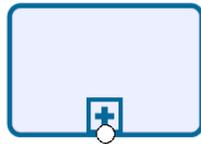


Dinasaker PMPTSP

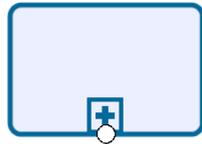


**P1 KETENAGAKERJAAN**

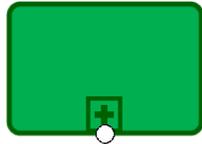




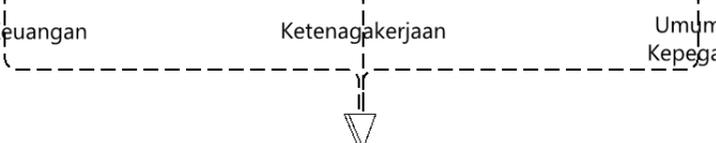
Analisis Keuangan



Ketenagakerjaan



Umum dan Kepegawaian



**P1. 1 Pelatihan dan Produktivitas**



P1.1.1 Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi



P1.1.2 Pengesahan Perjanjian Magang Dalam Negeri



P1.1.3 Monitoring Evaluasi

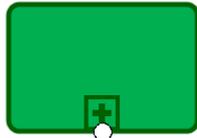


Fasilitasi dan Rekomendasi

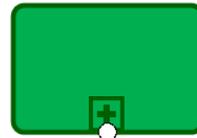




Analisis Keuangan



Umum dan Kepegawaian



Pengantar Kerja



Ketenagakerjaan



P1.2 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja



P1.2.1 Pelayanan AK1



P1.2.2 Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus



P1.2.3 Pelayanan Rekomendasi Paspor CPMI

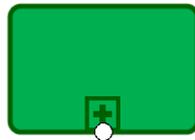


Koordinasi Pelayanan Perlindungan (BP2MI, P3MI, CPMI)

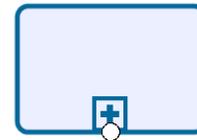




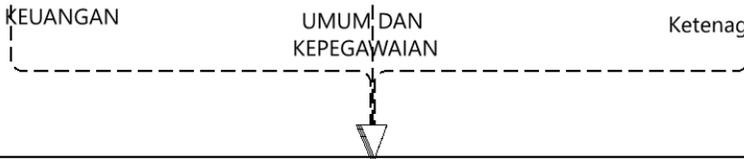
ANALIS KEUANGAN



UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN



Ketenagakerjaan



**P1.3 Hubungan Industrial**



P1.3.1 Pembinaan  
LKS Tripartit Kota  
Malang dan  
Pemantauan UMK,  
THR, dan  
Penanganan May  
Day



P1.3.2 Pembinaan  
Tentang Pemahaman  
dan Tata Cara  
Penyelesaian  
Perselisihan  
Hubungan  
Internasional



P1.3.3 Pembinaan  
Peraturan Syarat-Syarat  
Kerja, Pengupahan dan  
Jaminan Sosial Tenaga  
Kerja

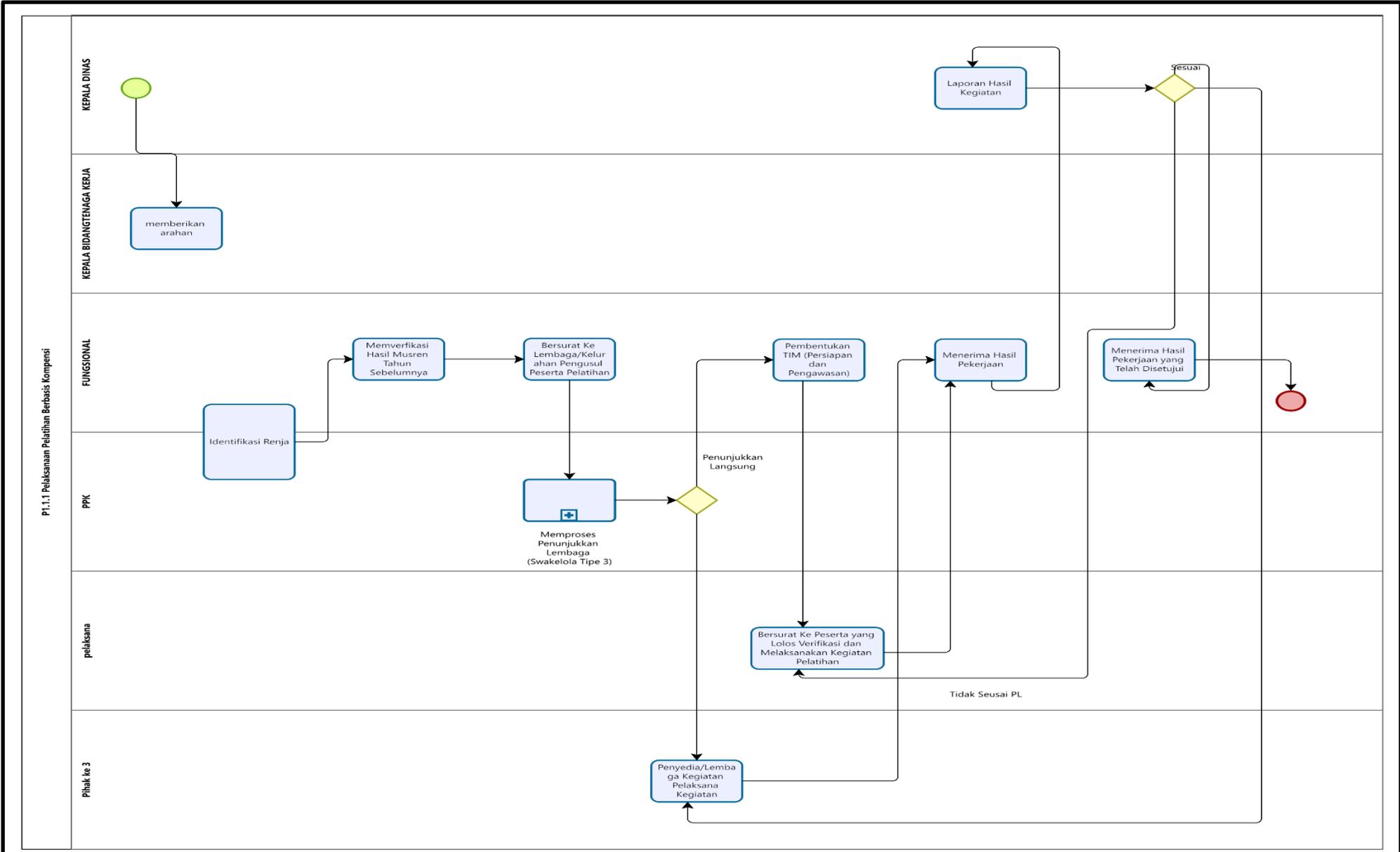


Koordinasi dan  
Mediasi Upah dan  
HI

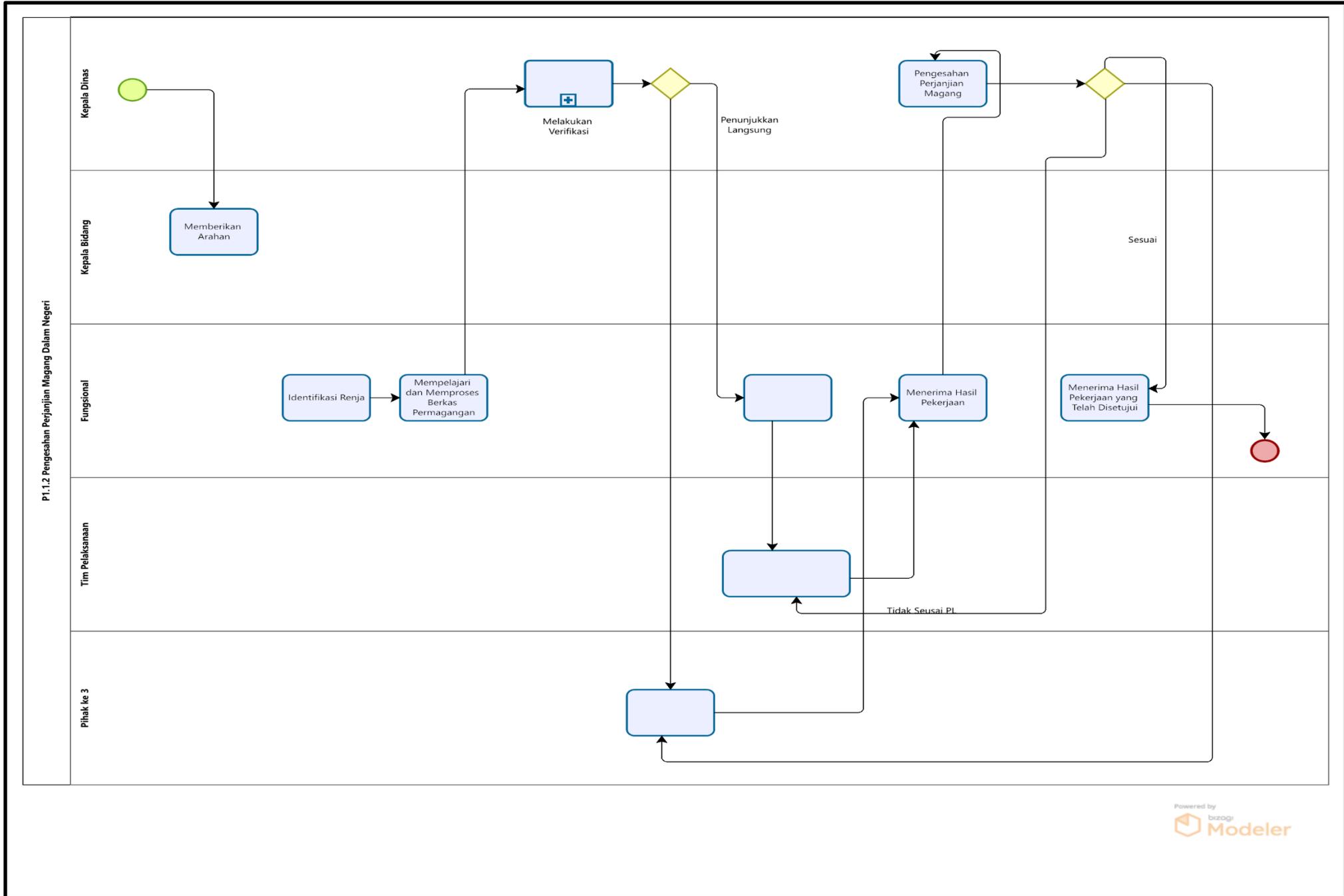


**N1 KETENAGAKERJAAN**

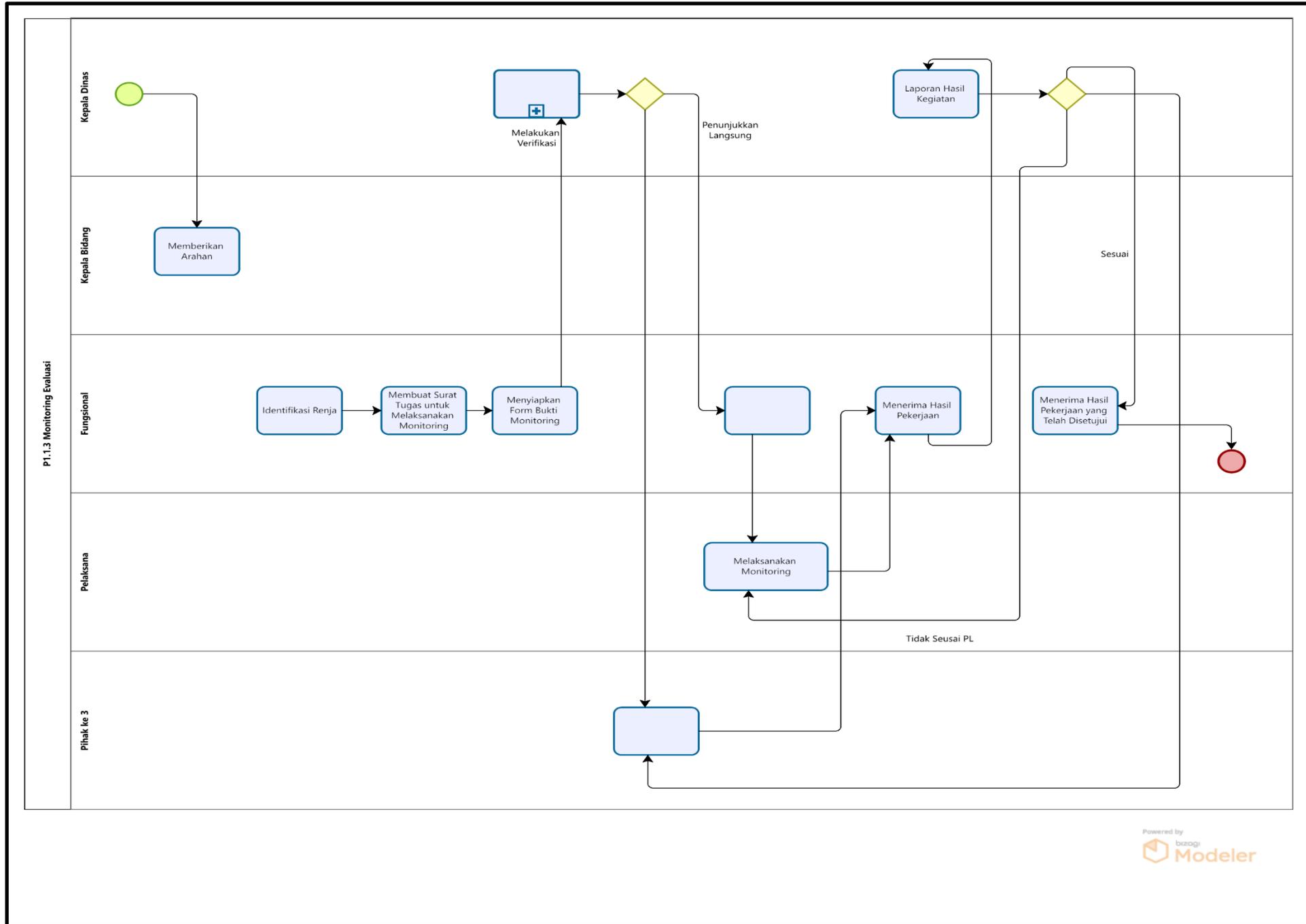
# N1.1.1 Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi



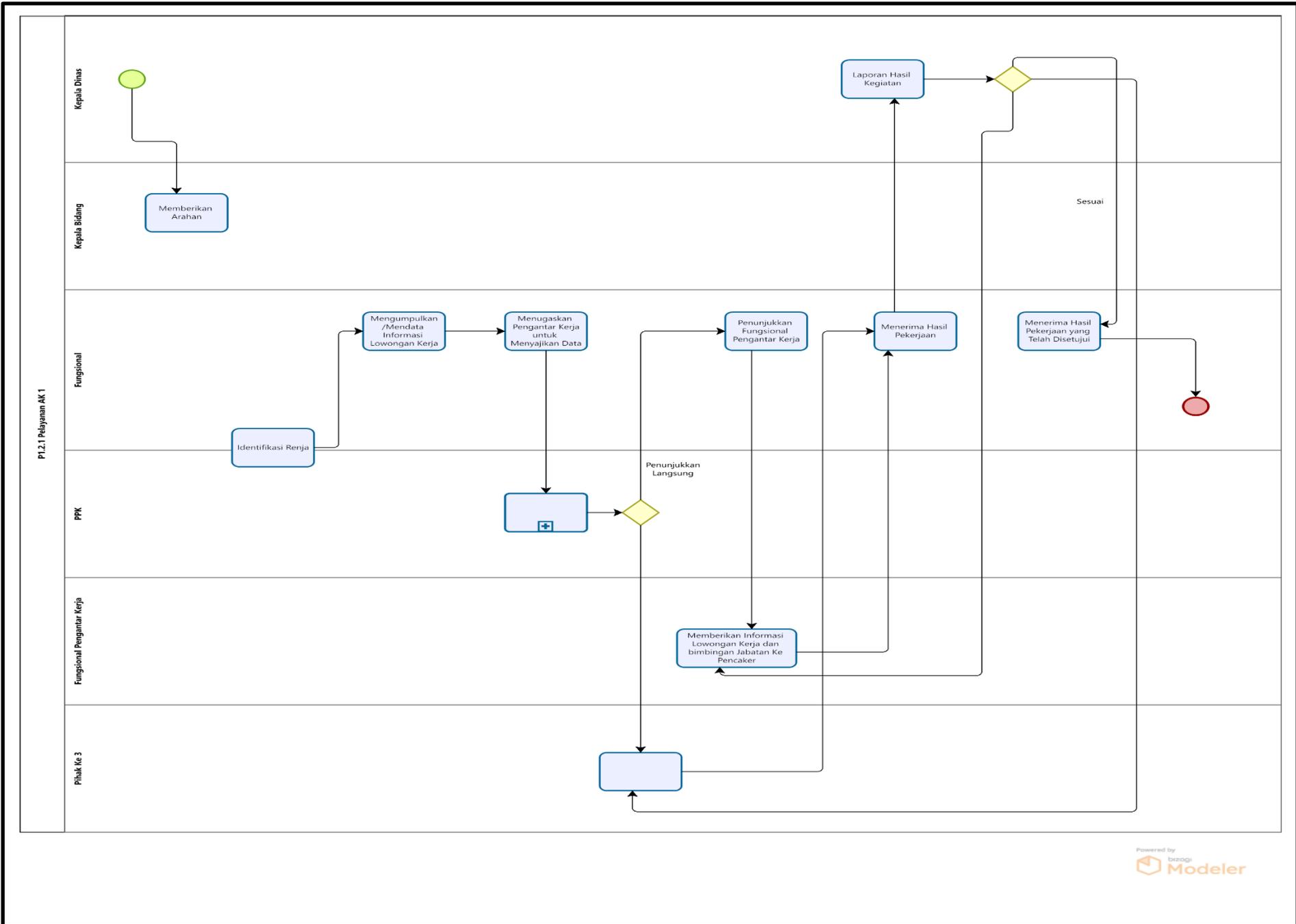
# N1.1.2 Pengesahan Perjanjian Magang Dalam Negeri



### N1.1.3 Monitoring Evaluasi

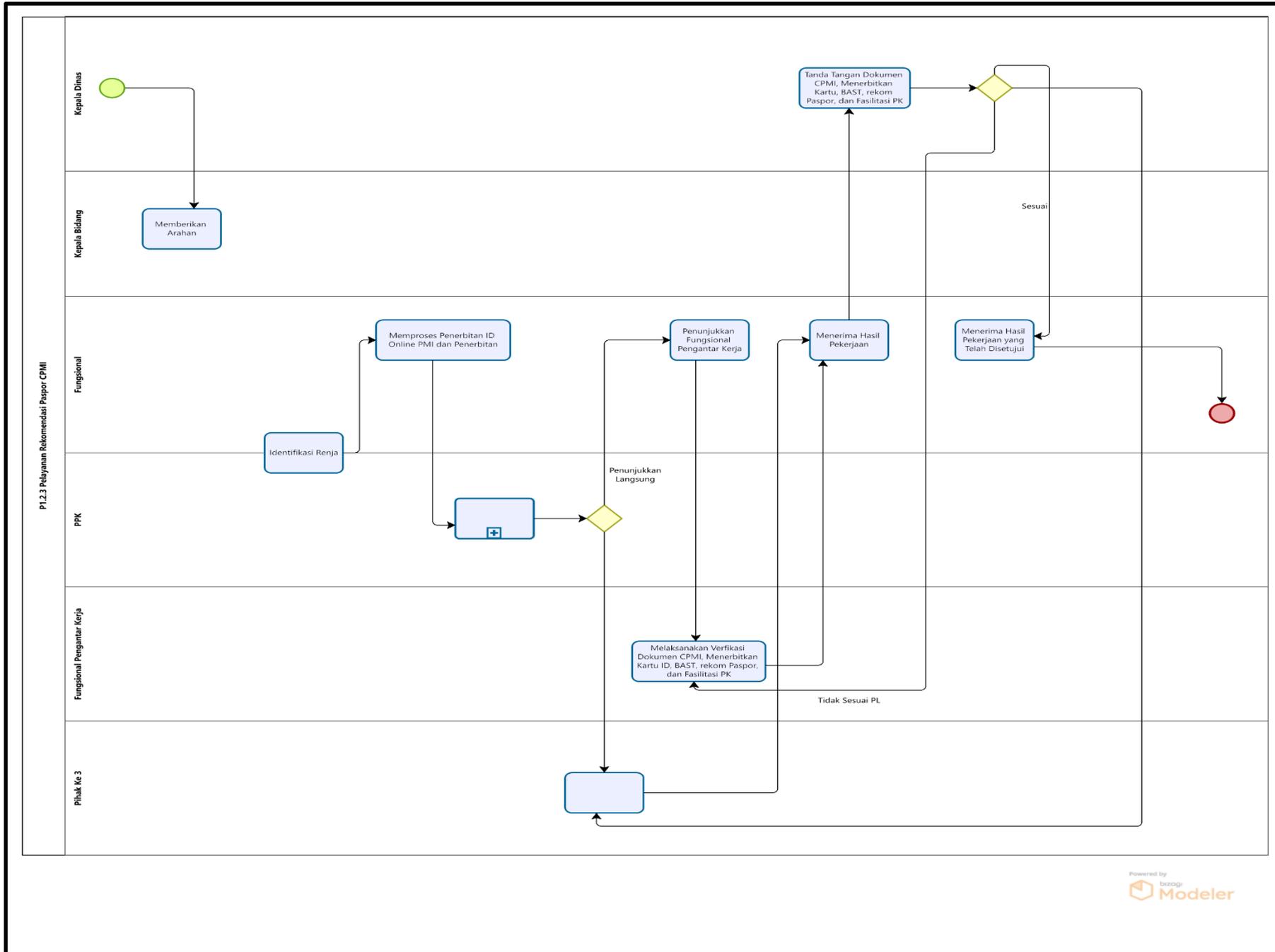


# N1.2.1 Pelayanan AK 1

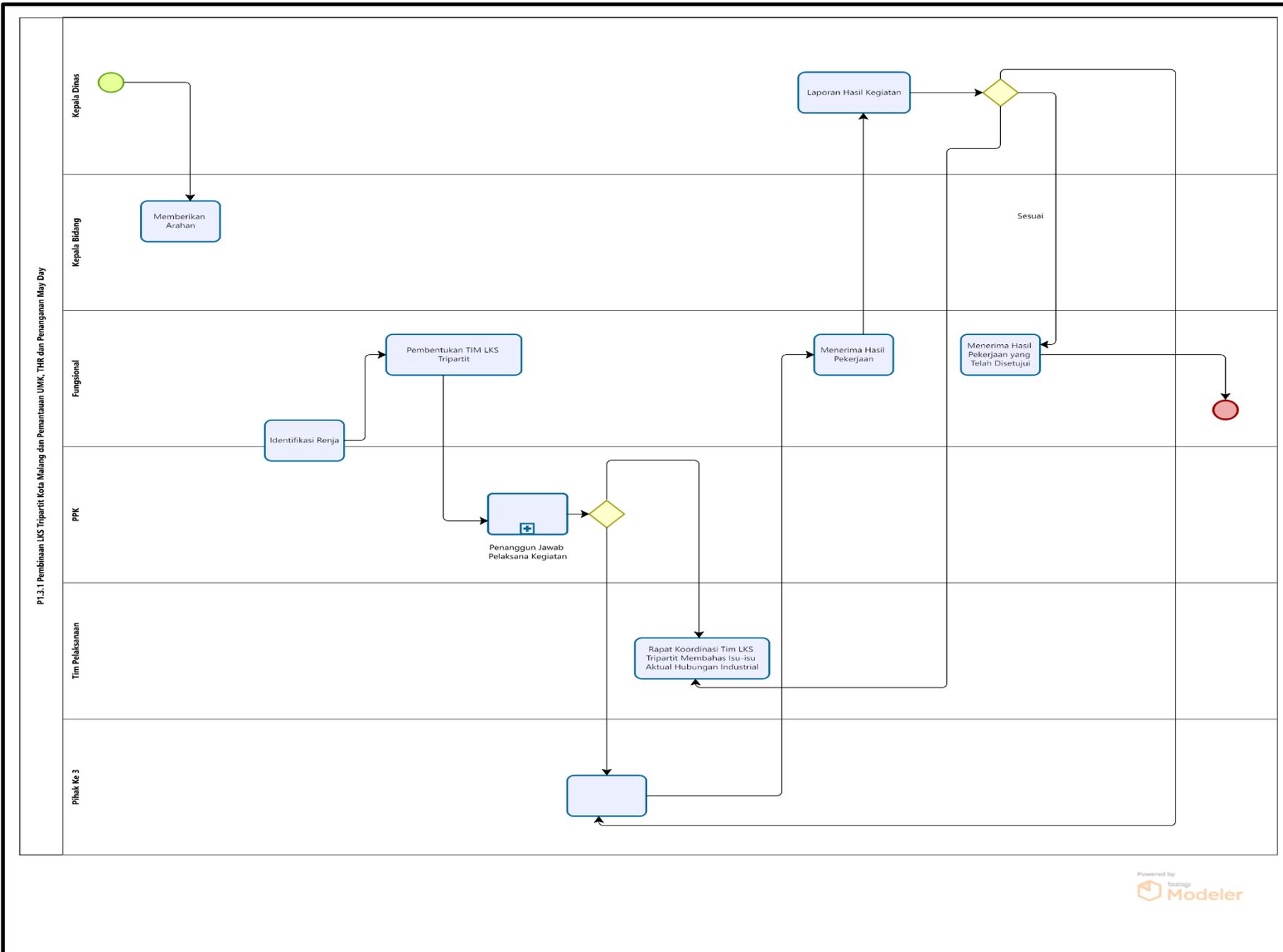




### N1.2.3 Pelayanan Rekomendasi Paspor CPMI

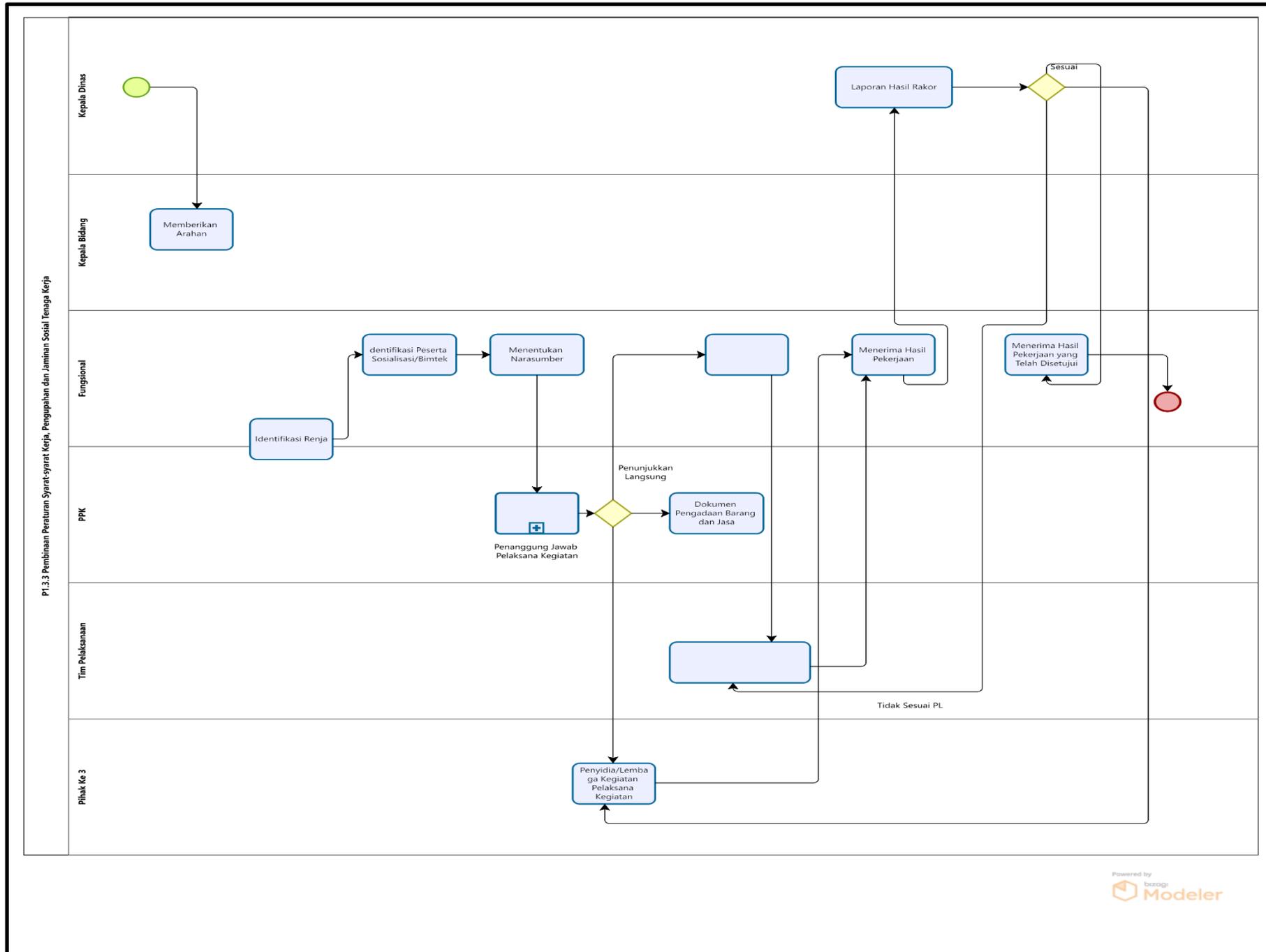


### N1.3.1 Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK, THR dan Penanganan May Day

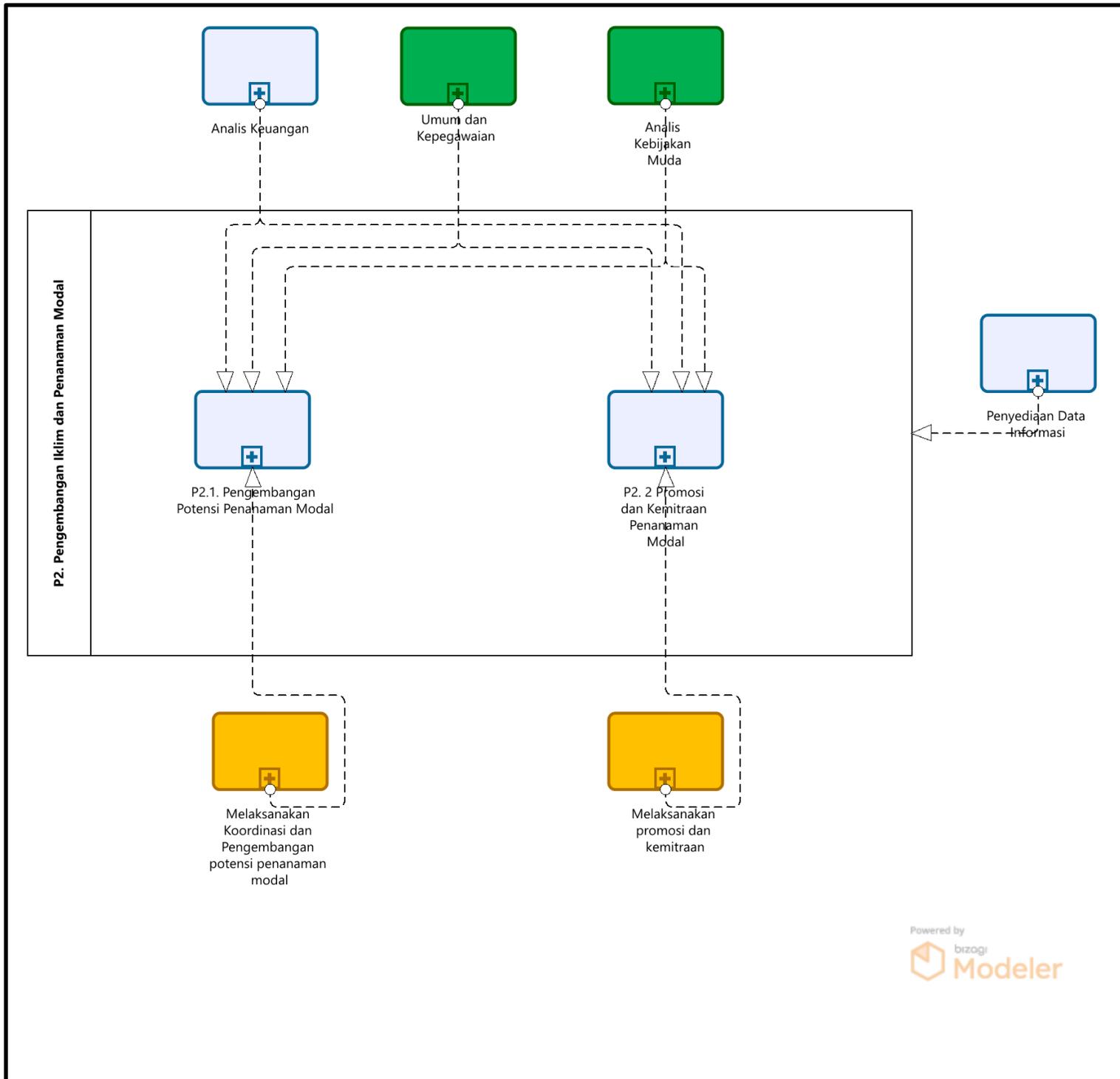


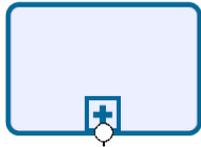


### N1.3.3 Pembinaan Peraturan Syarat-syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

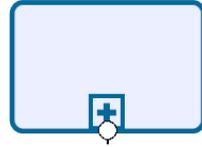


**P2 PENGEMBANGAN IKLIM  
DAN PENANAMAN MODAL**

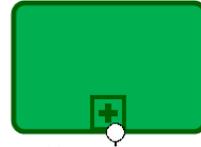




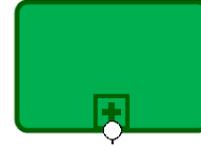
Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal



Analisis Keuangan



Umum dan Kepegawaian



Analisis Kebijakan Muda



**P2. 1 Pengembangan Potensi Penanaman Modal**

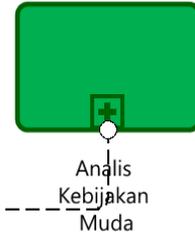
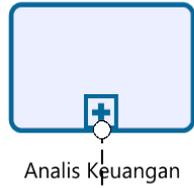
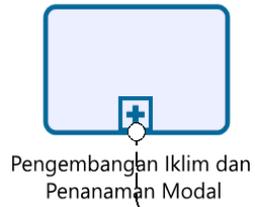


P2.1.1 Pengembangan Potensi Penanaman Modal

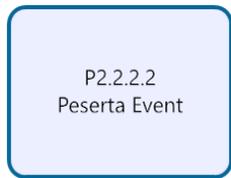
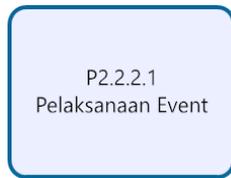
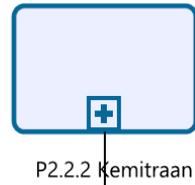


Metaksanakan Koordinasi dan Pengembangan potensi penanaman modal



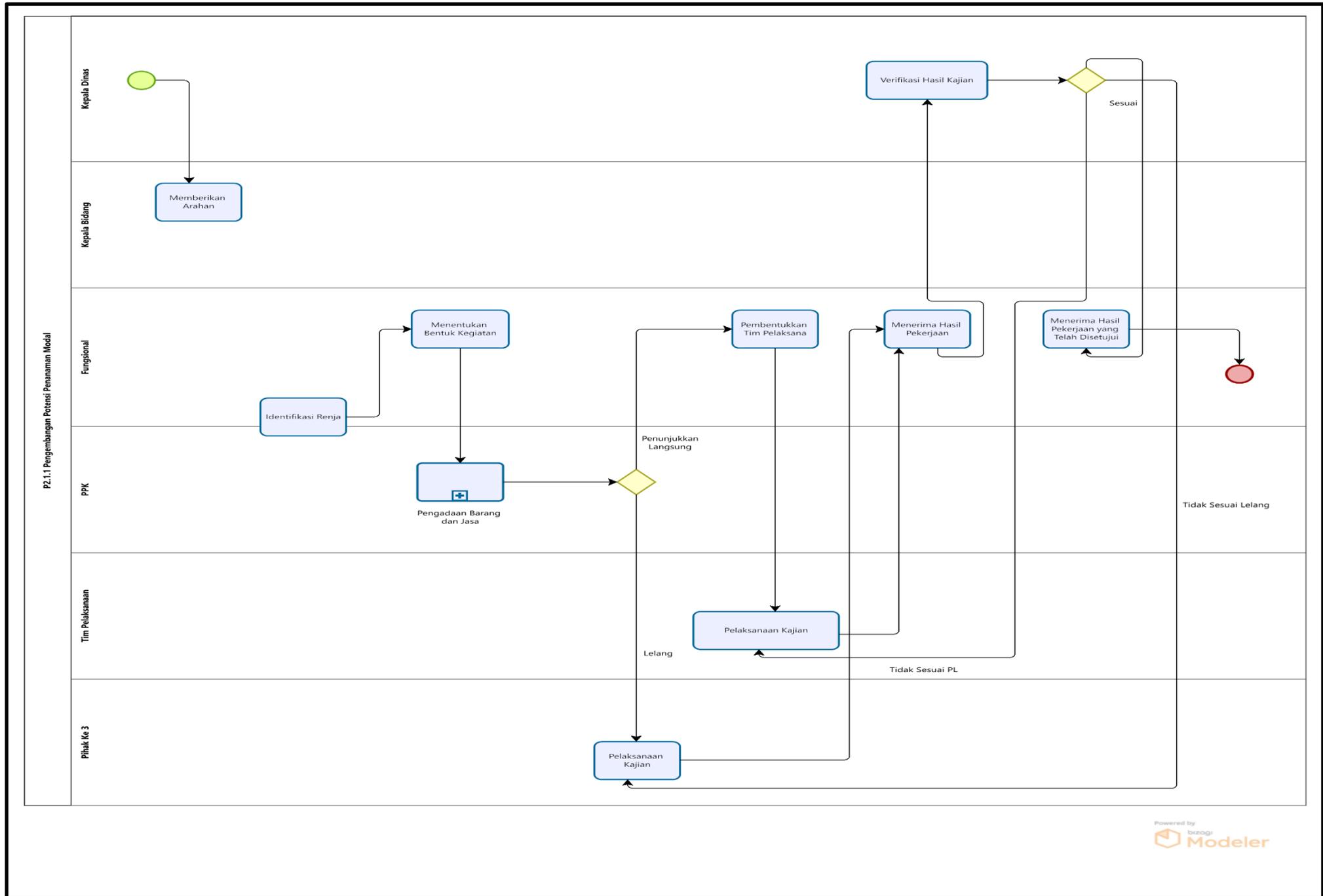


**P2. 2 Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal**

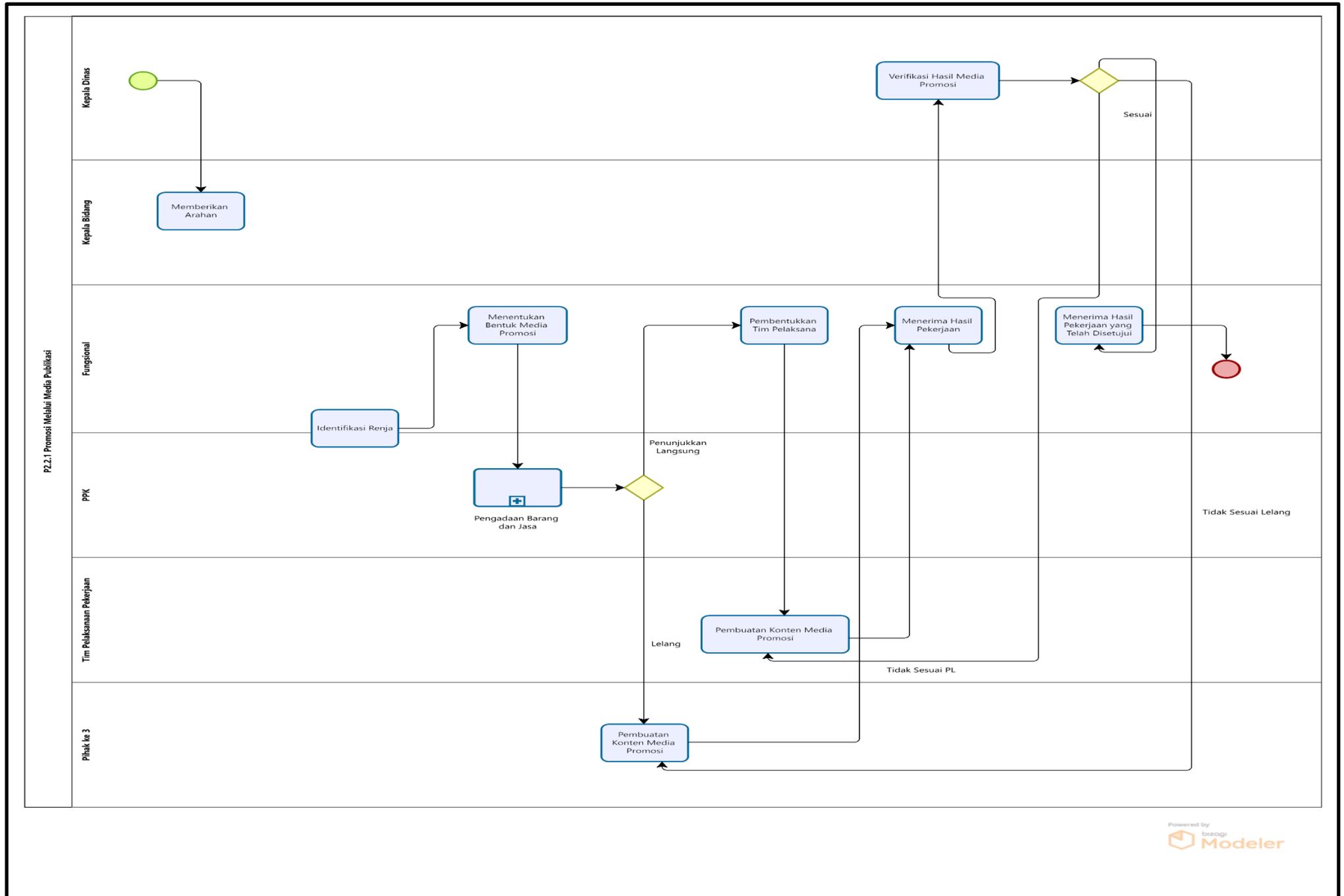


# **N2 PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENANAMAN MODAL**

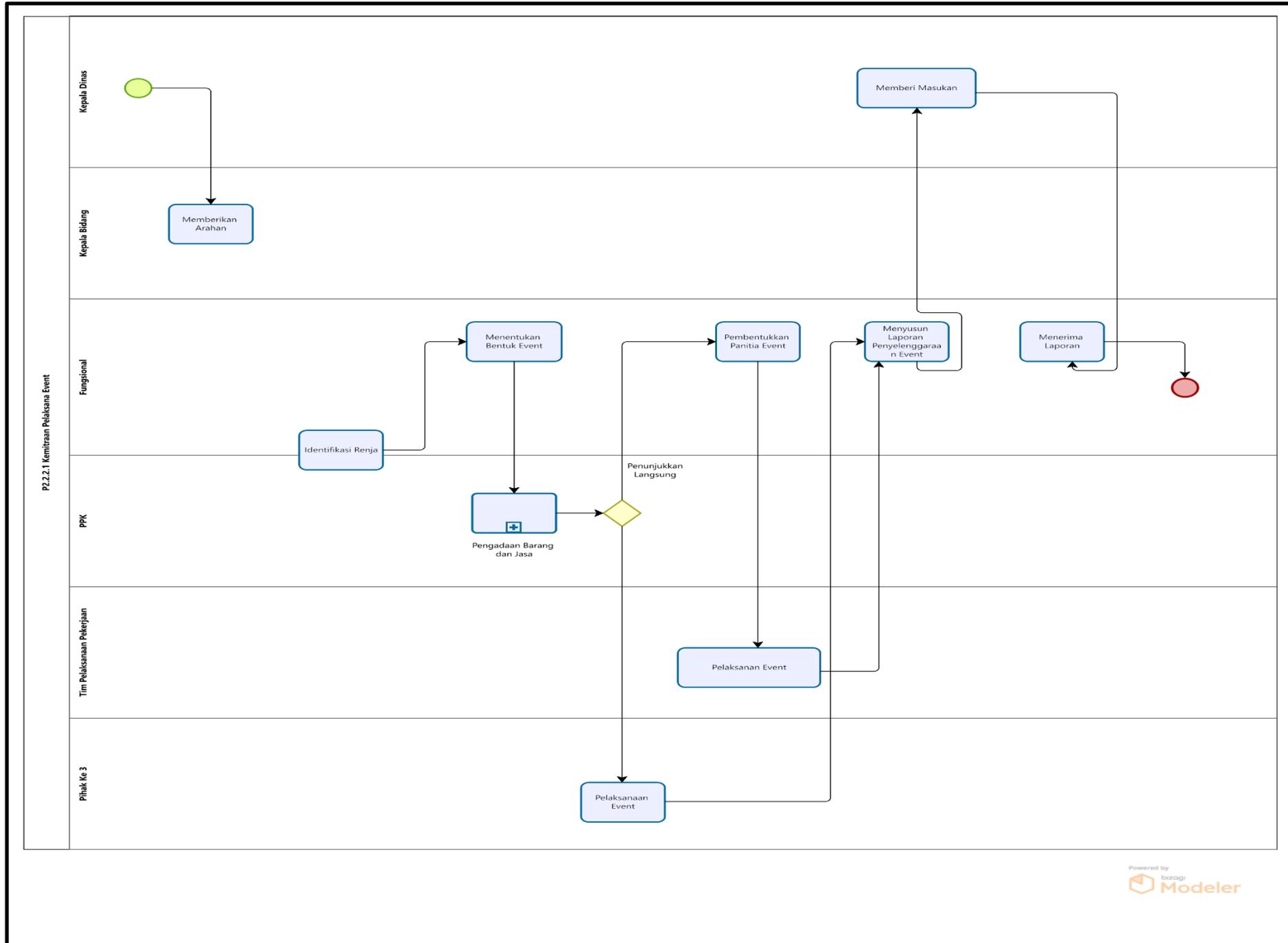
## N2.1.1 Pengembangan Potensi Penanaman Modal



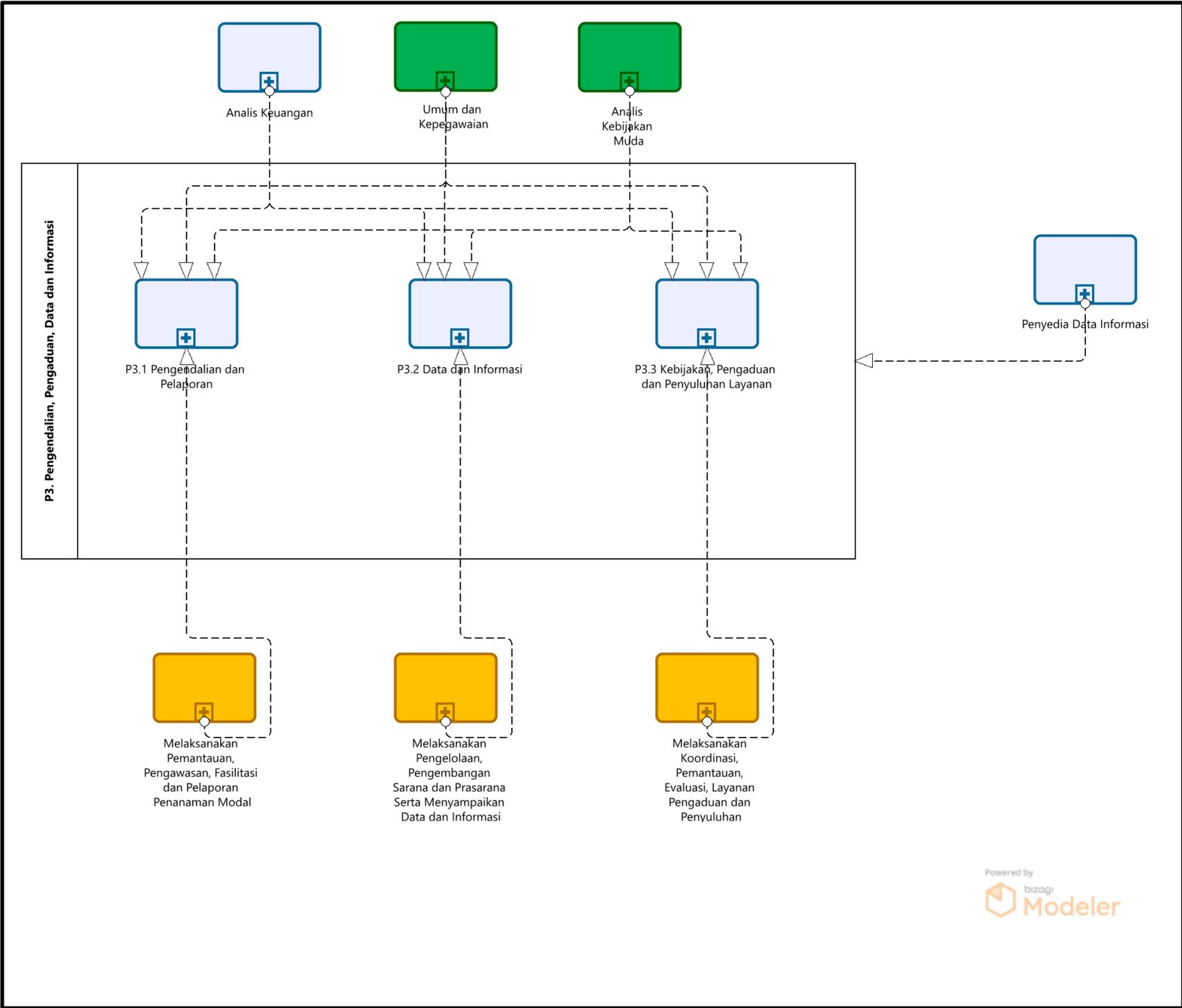
## N2.2.1 Promosi Melalui Media Publikasi

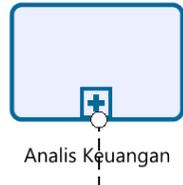


## N2.2.2.1 Kemitraan Pelaksana Event

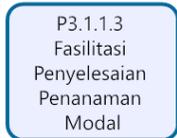
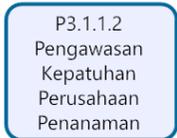
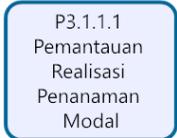


**P3 PENGENDALIAN,  
PENGADUAN, DATA DAN  
INFORMASI**





**P3.1 Pengendalian dan Pelaporan**





Pengendalian,  
Pengaduan, Data dan  
Informasi



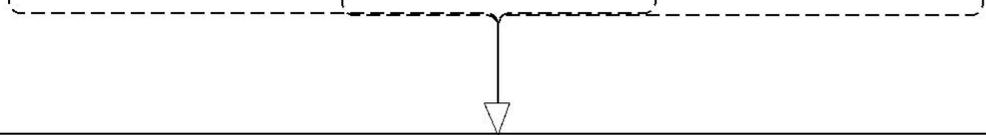
Analisis Keuangan



Umum dan  
Kepegawaian



Analisis  
Kebijakan  
Muda



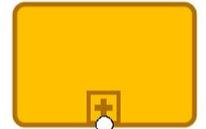
**P3.2 Data dan Informasi**



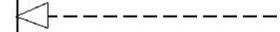
P3.2.1 Pengelolaan Data



P3.2.2 Pengelolaan dan  
Pengembangan Sistem  
Informasi



Melaksanakan  
Pengelolaan,  
Pengembangan  
Sarana dan Prasarana  
Serta Menyampaikan  
Data dan Informasi





Pengendalian,  
Pengaduan, Data dan  
Informasi



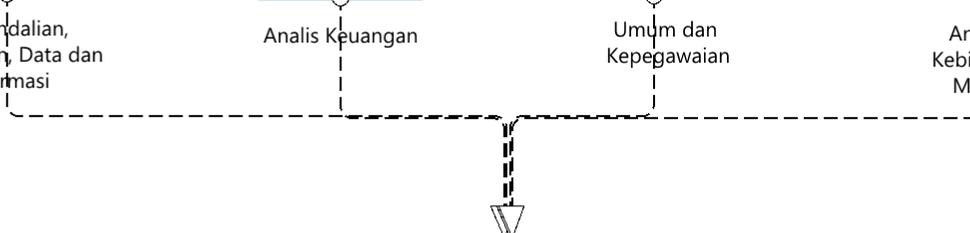
Analisis Keuangan



Umum dan  
Kepegawaian



Analisis  
Kebijakan  
Muda



**P.3.3 Kebijakan, Pengaduan dan Penyuluhan Layanan**



P3.3.1 Pengelolaan  
Layanan Pengaduan  
Masyarakat



P3.3.2 Pembinaan dan  
Penyuluhan Layanan

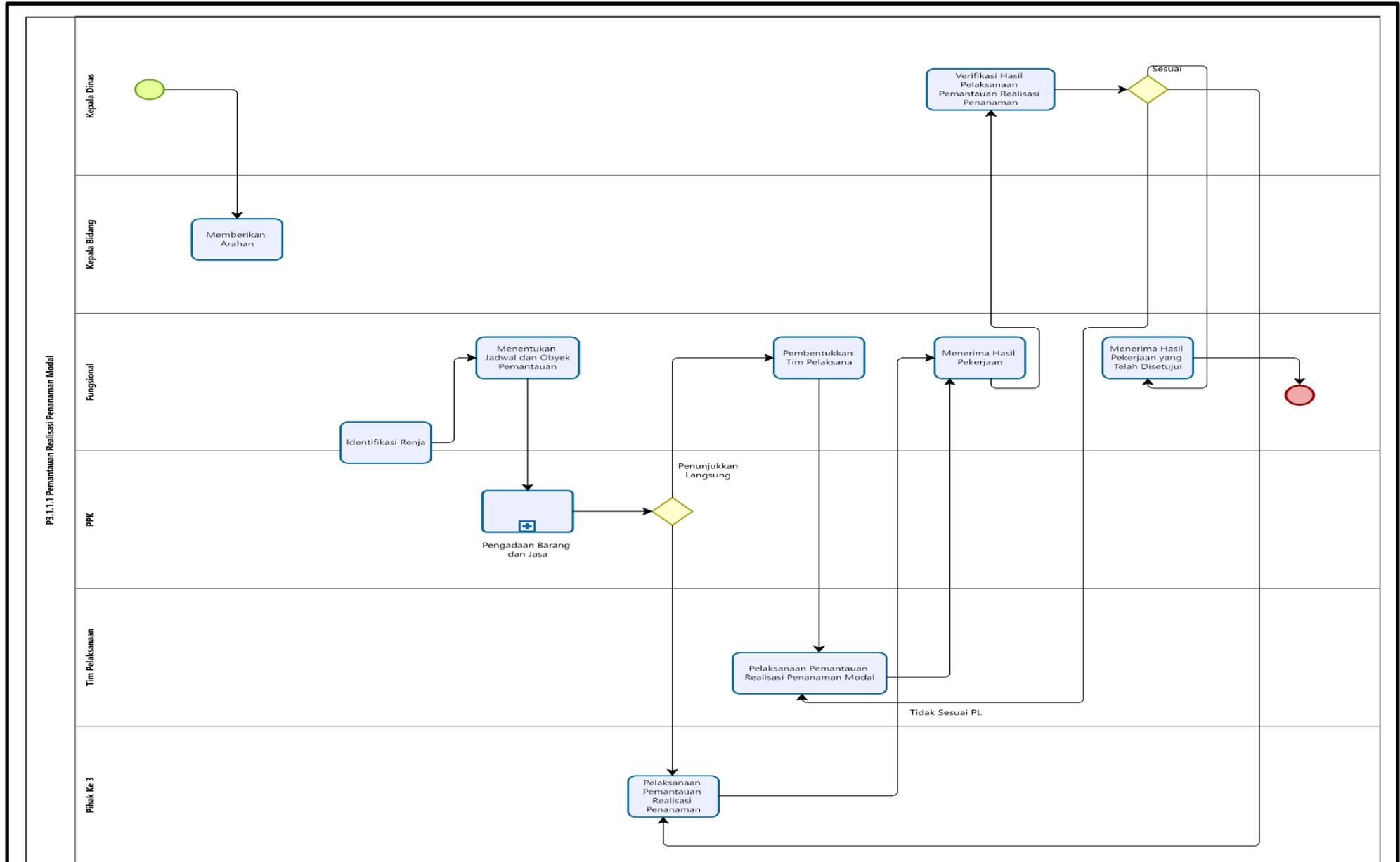


Melaksanakan  
Koordinasi,  
Pemantauan,  
Evaluasi, Layanan  
Pengaduan dan  
Penyuluhan

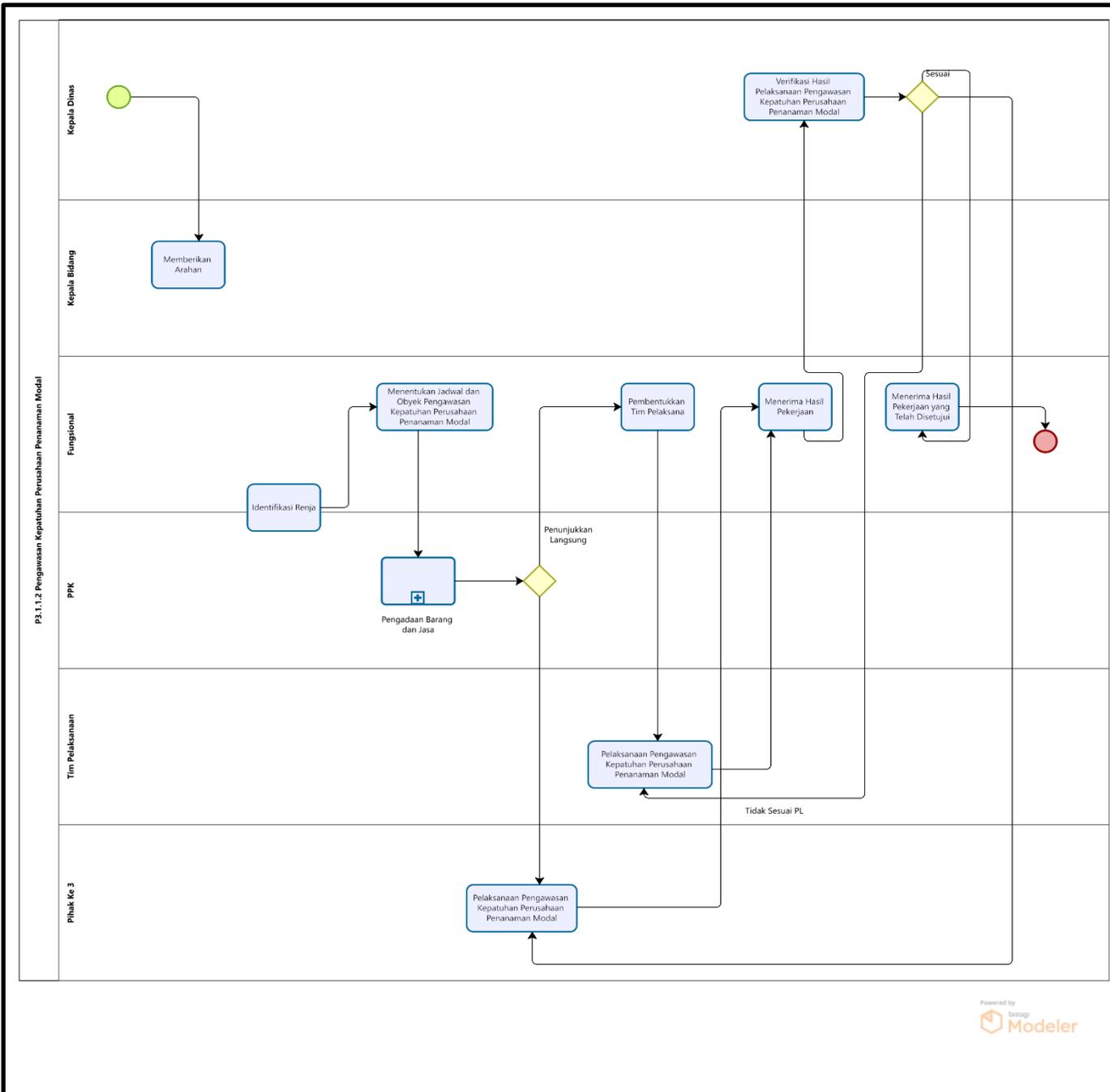


**N3 PENGENDALIAN,  
PENGADUAN, DATA DAN  
INFORMASI**

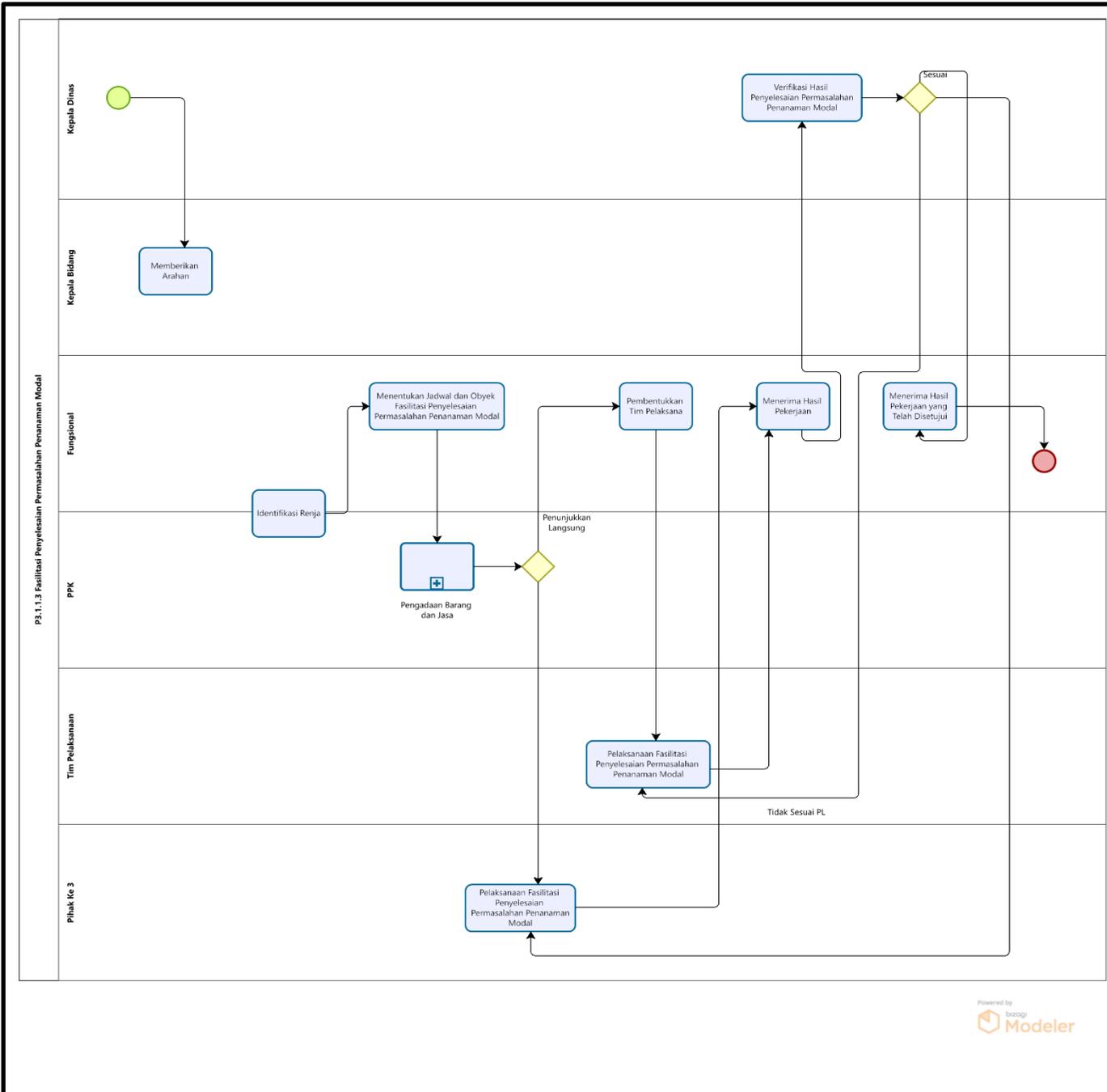
### N3.1.1.1 Pemantauan Realisasi Penanaman Modal



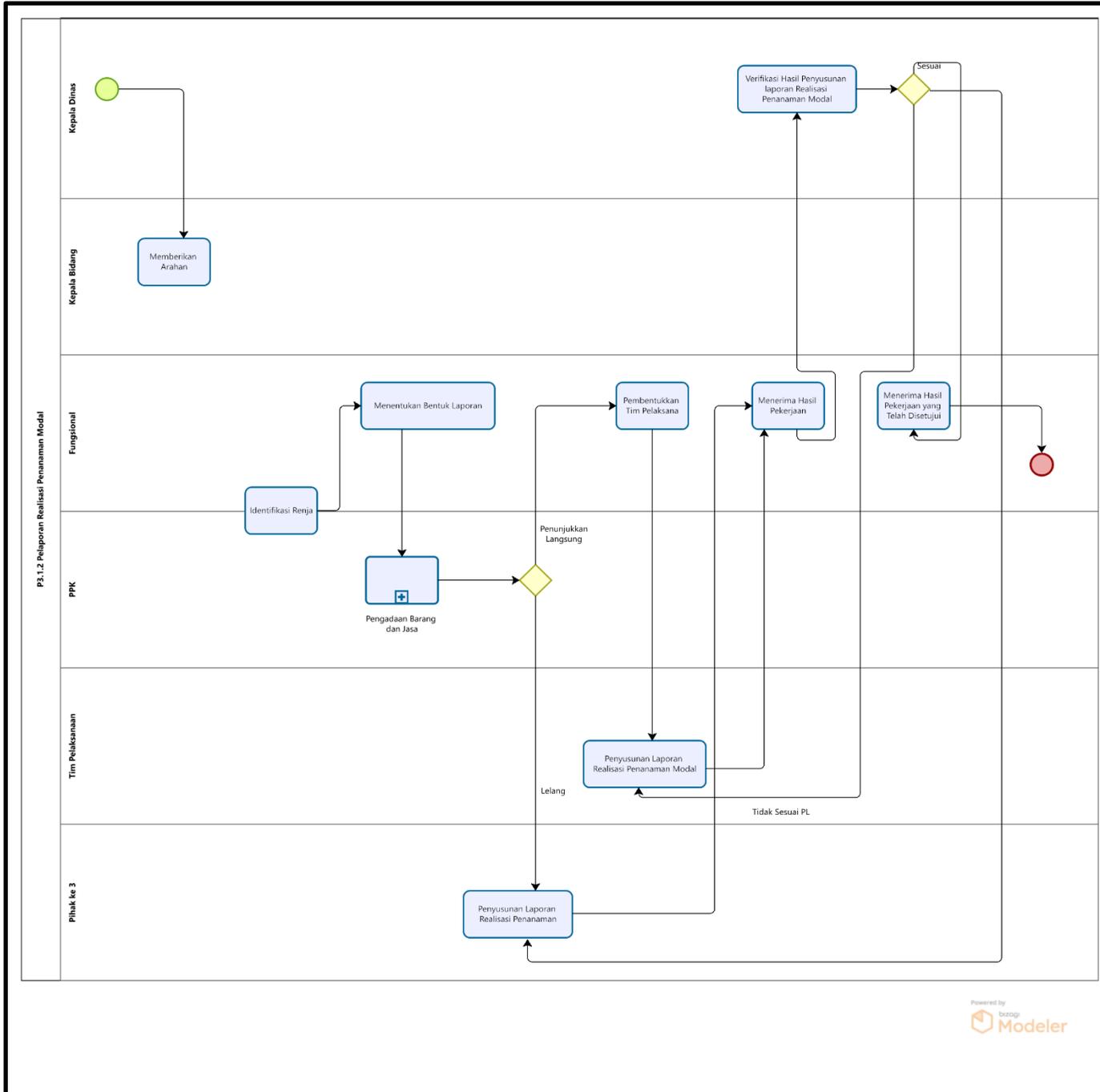
### N3.1.1.2 Pengawasan Kepatuhan Perusahaan Penanaman Modal



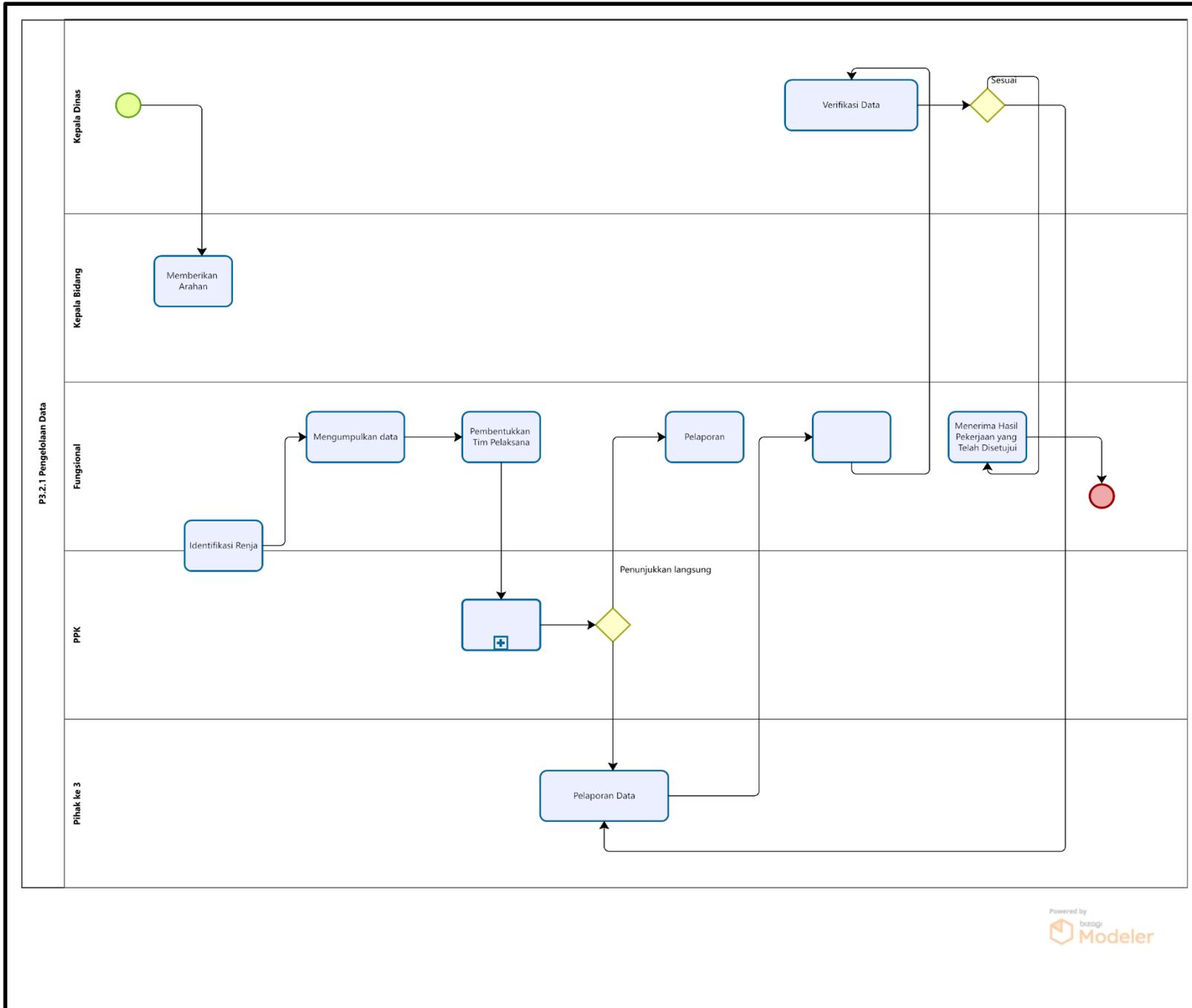
### N3.1.1.3 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal



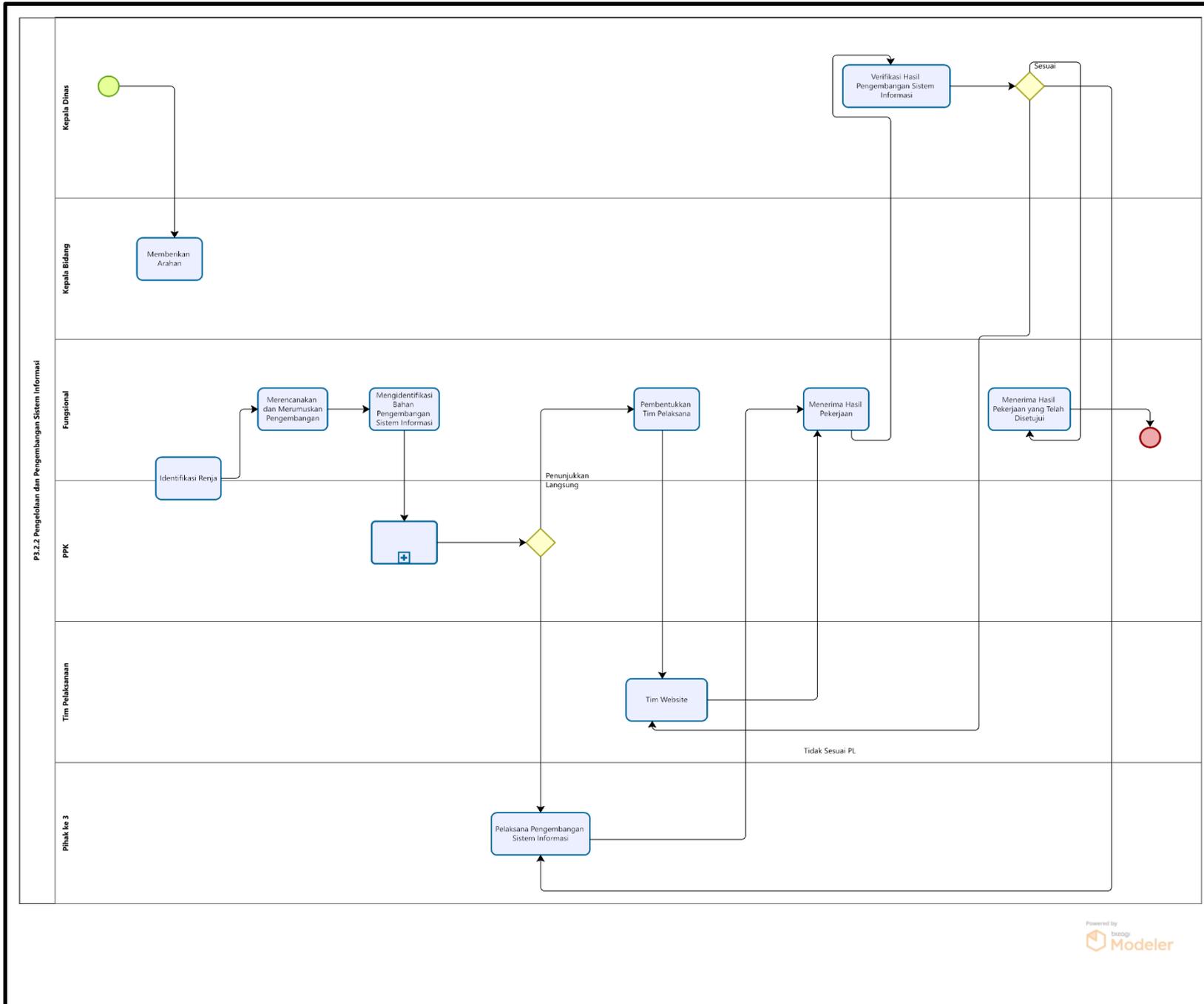
### N3.1.2 Pelaporan Realisasi Penanaman Modal



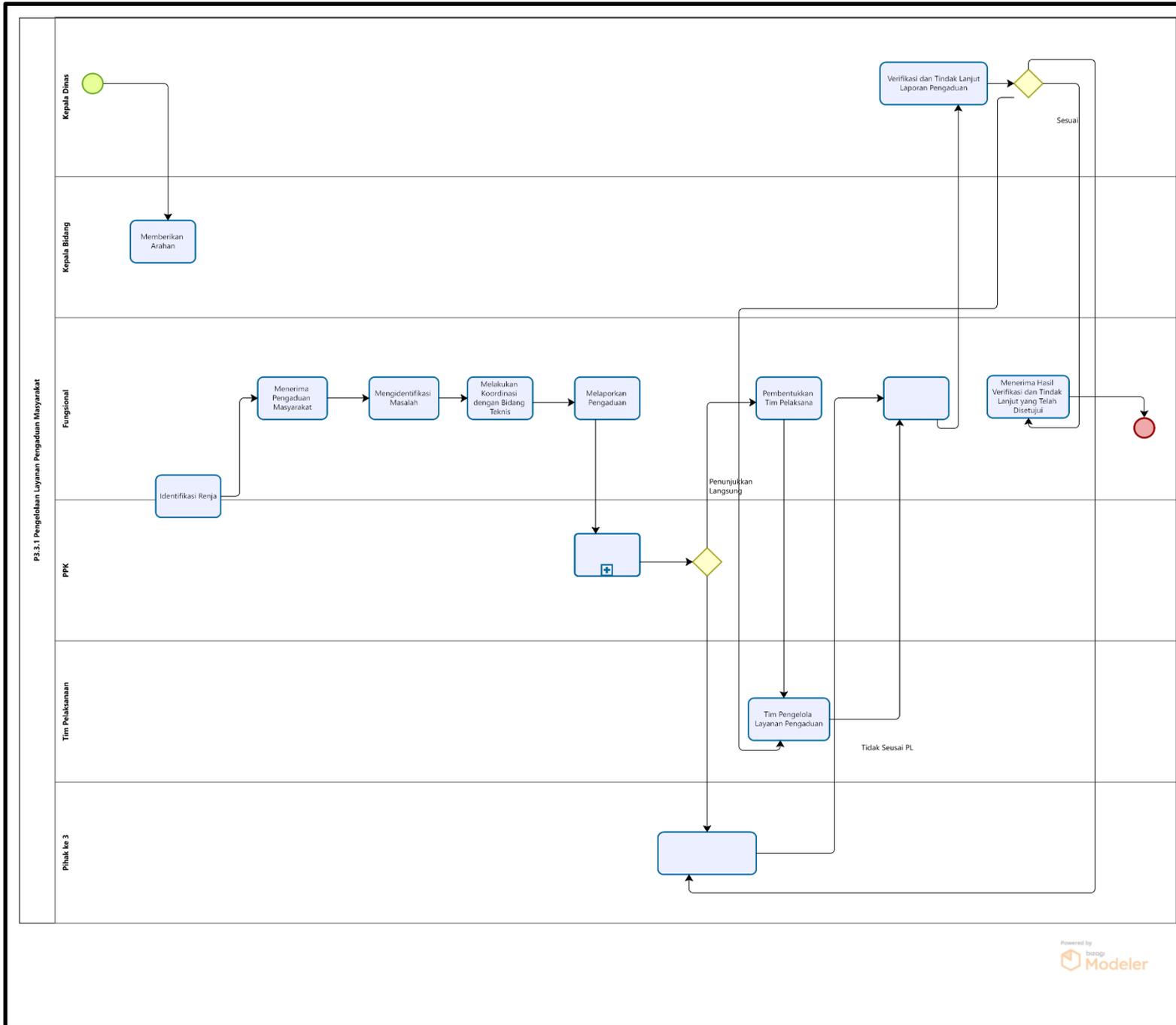
### N3.2.1 Pengelolaan Data



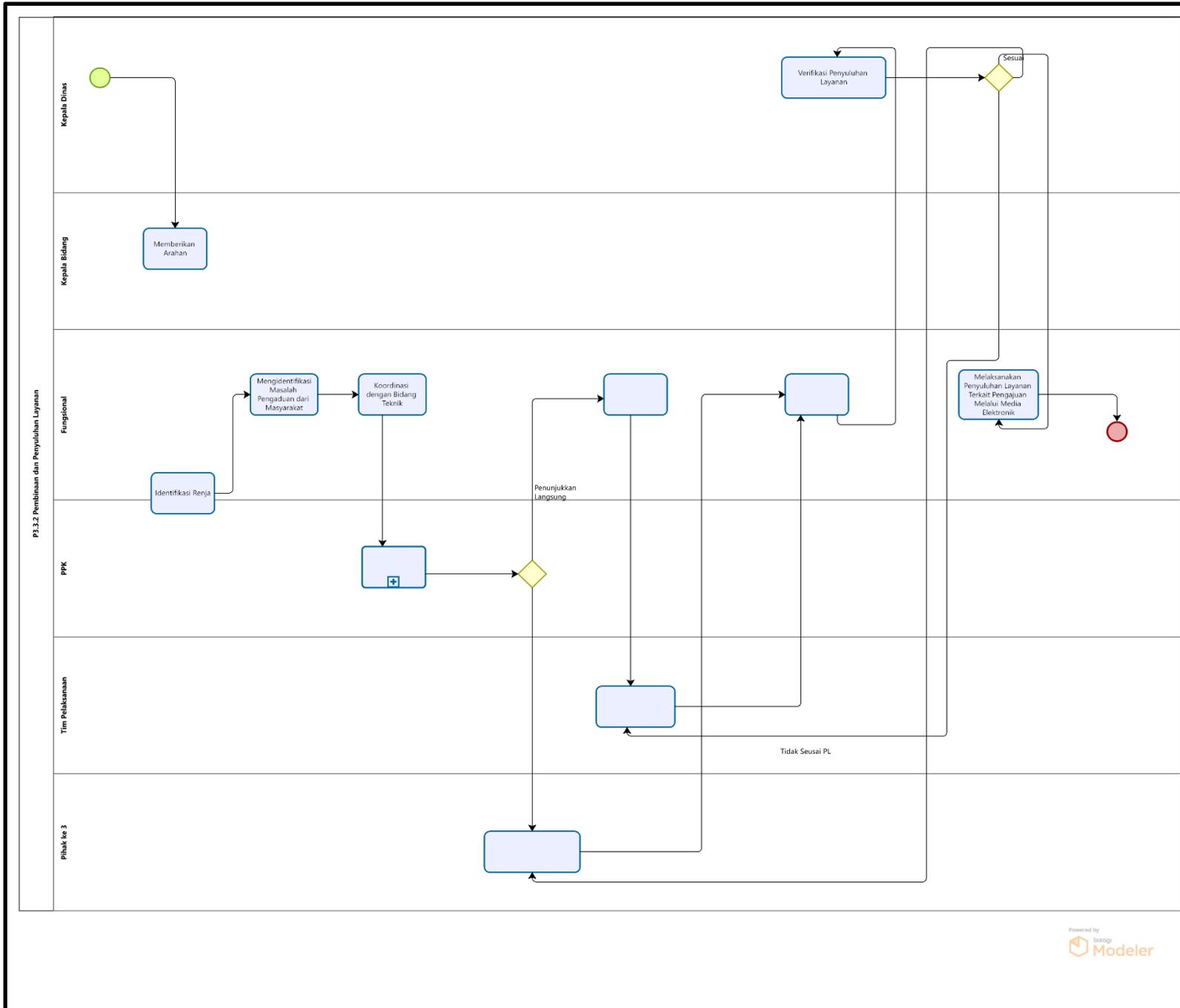
### N3.2.2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi



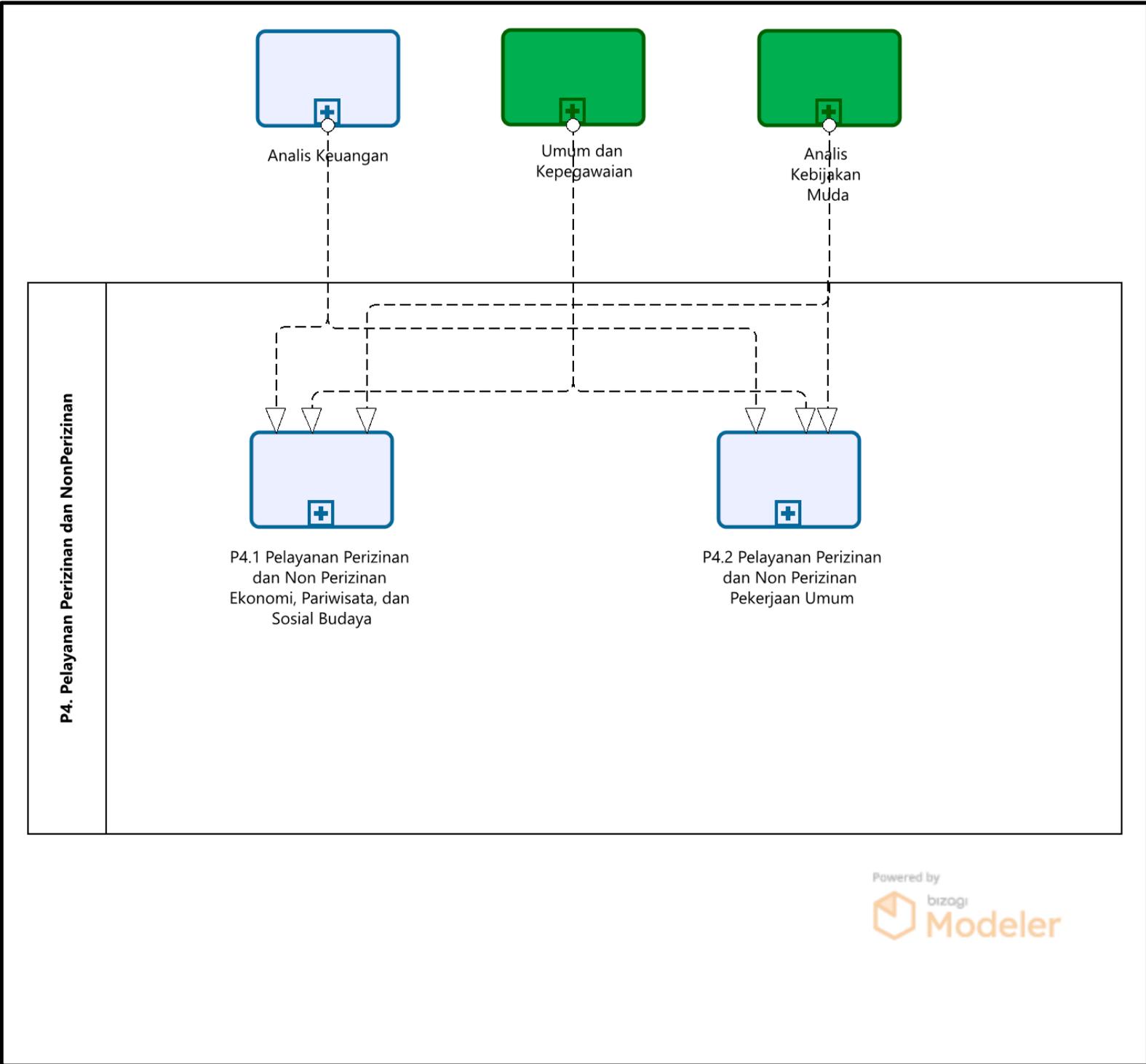
### N3.3.1 Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat

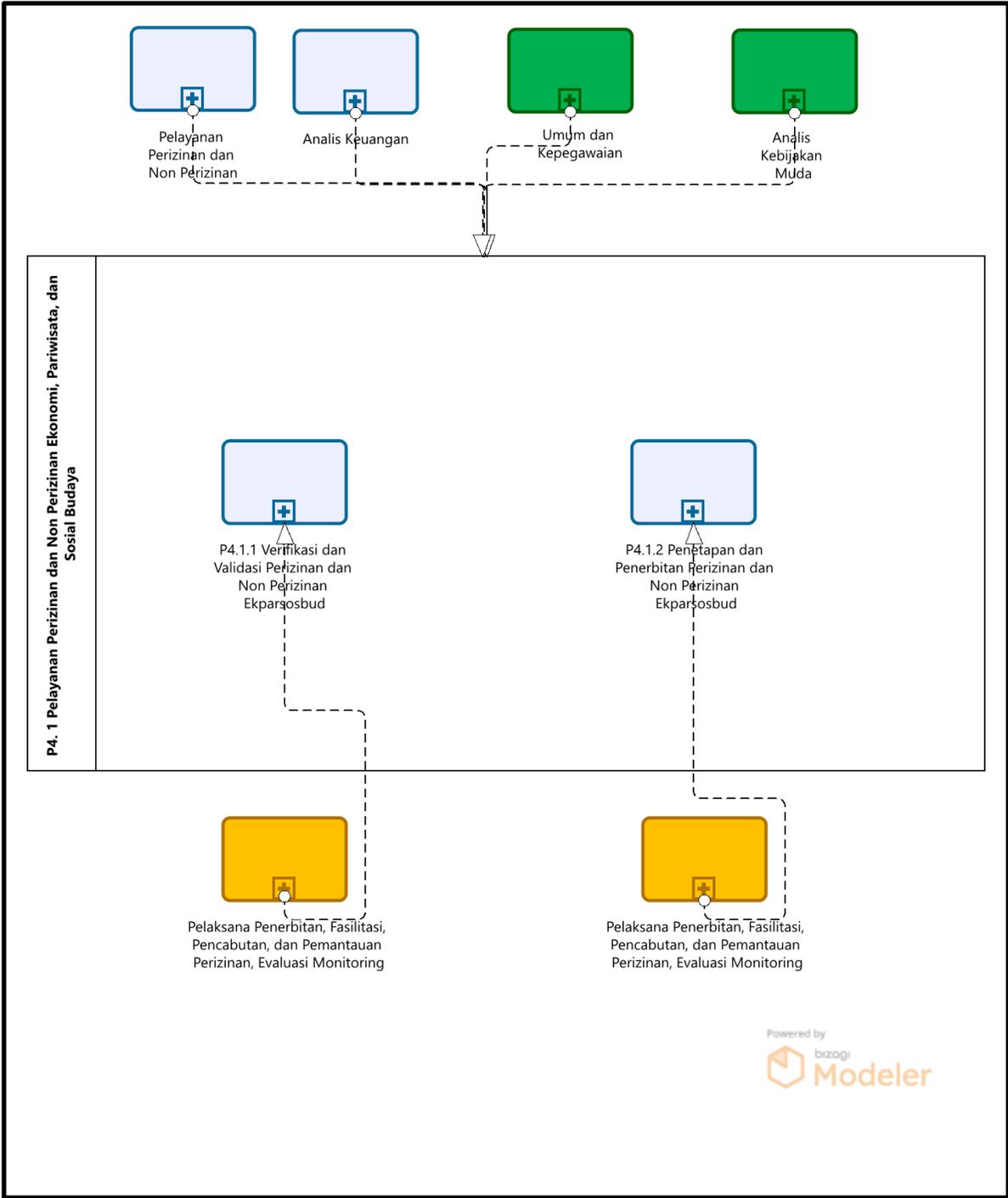


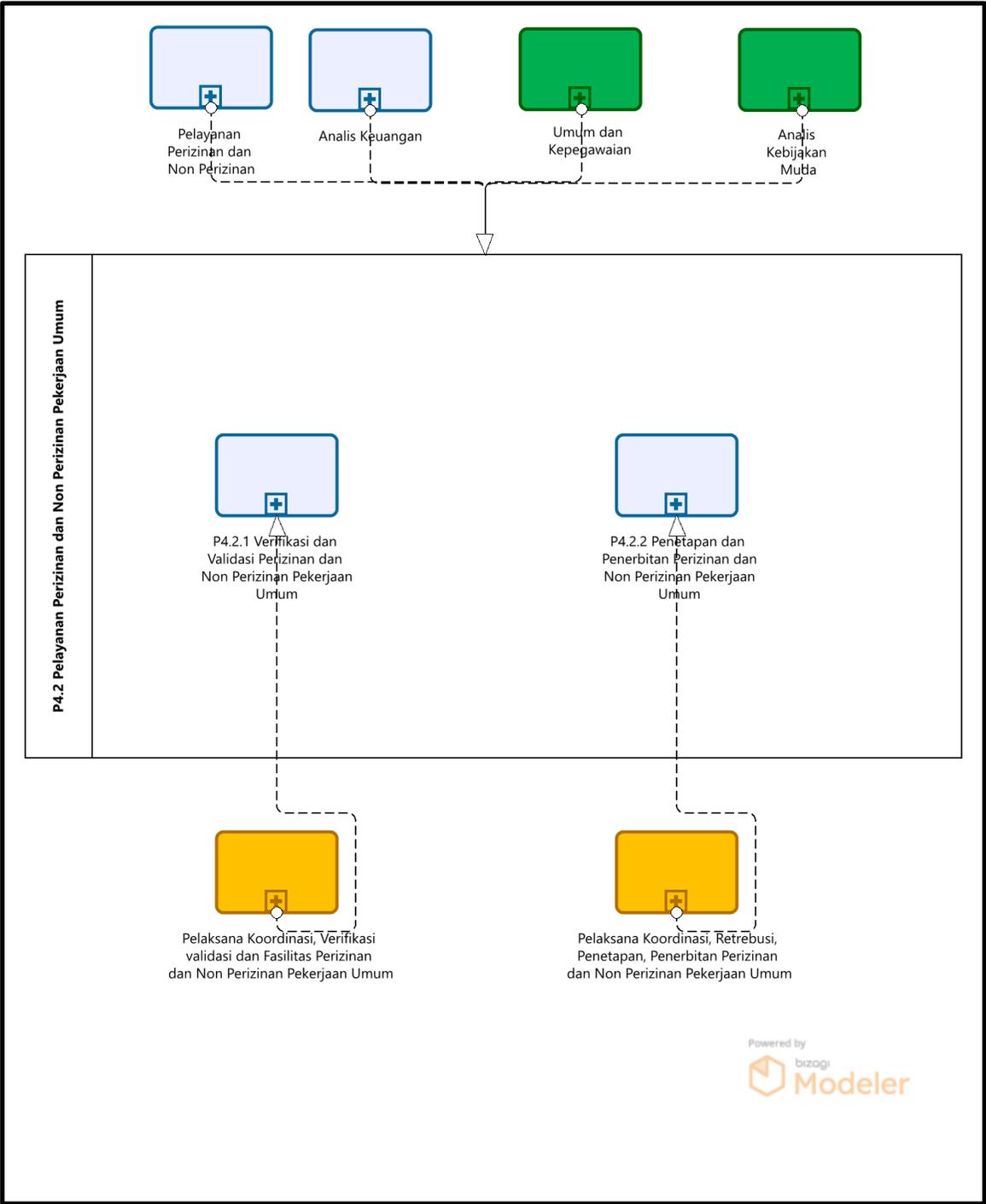
### N3.3.2 Pembinaan dan Penyuluhan Layanan



# **P4 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

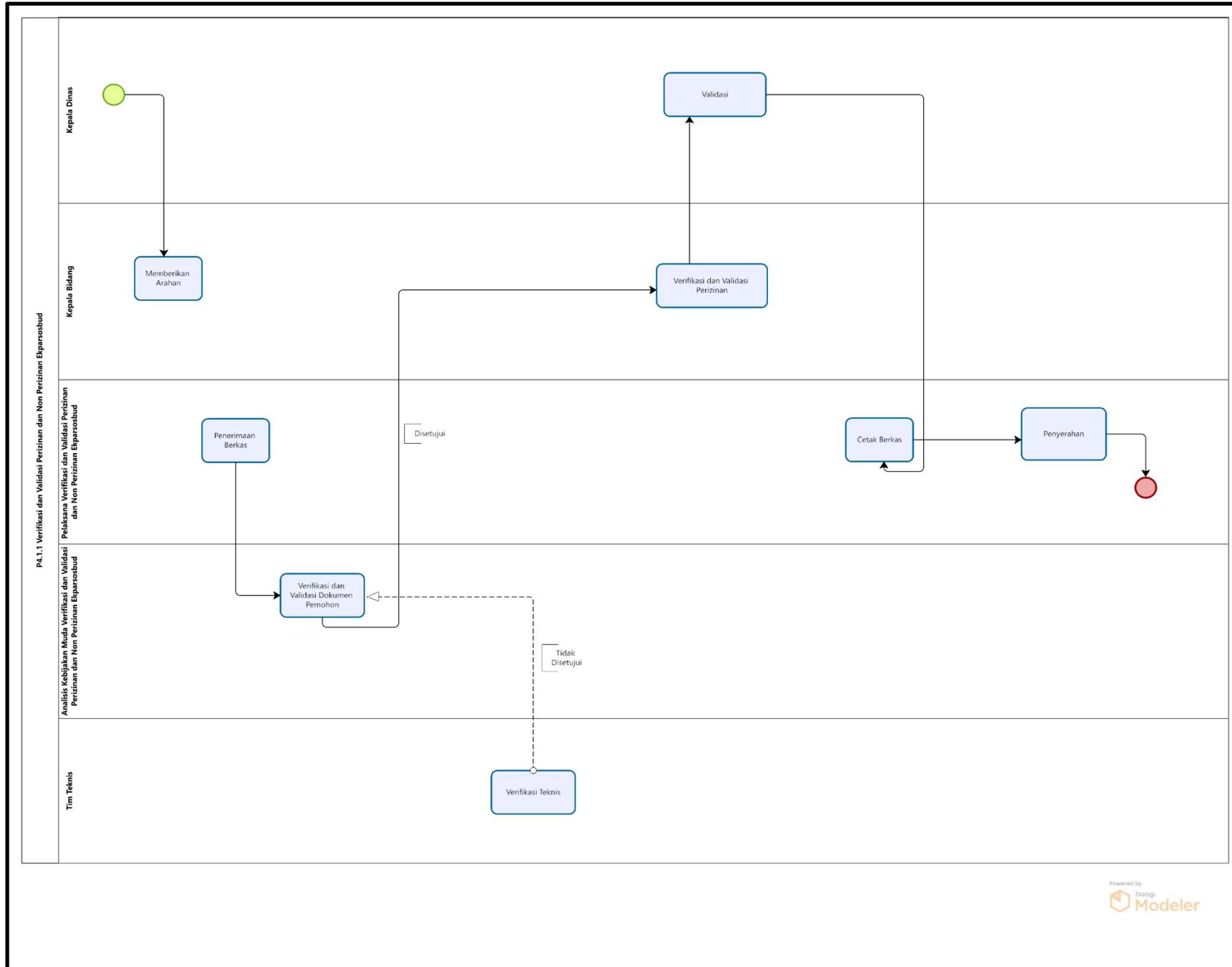




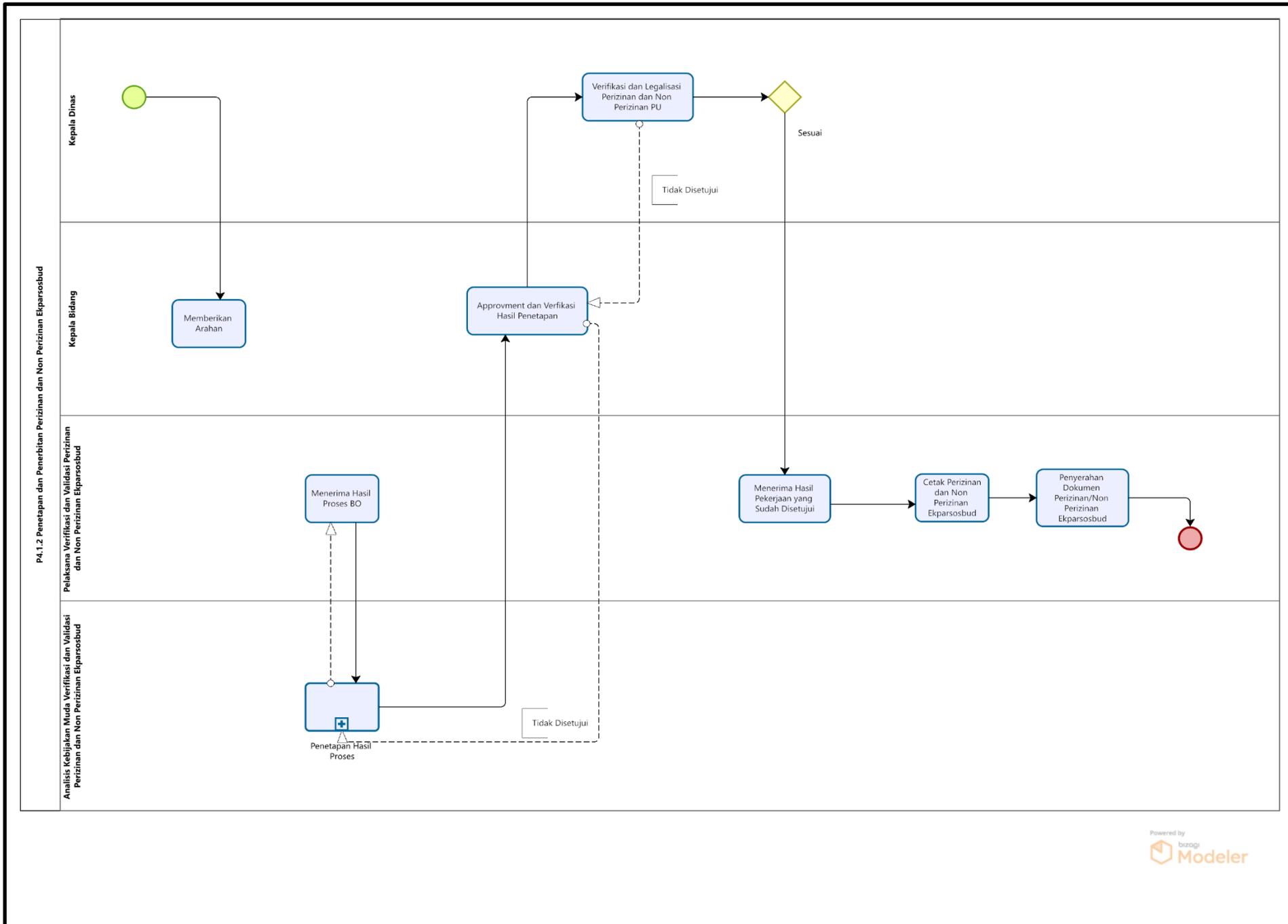


# **N4 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

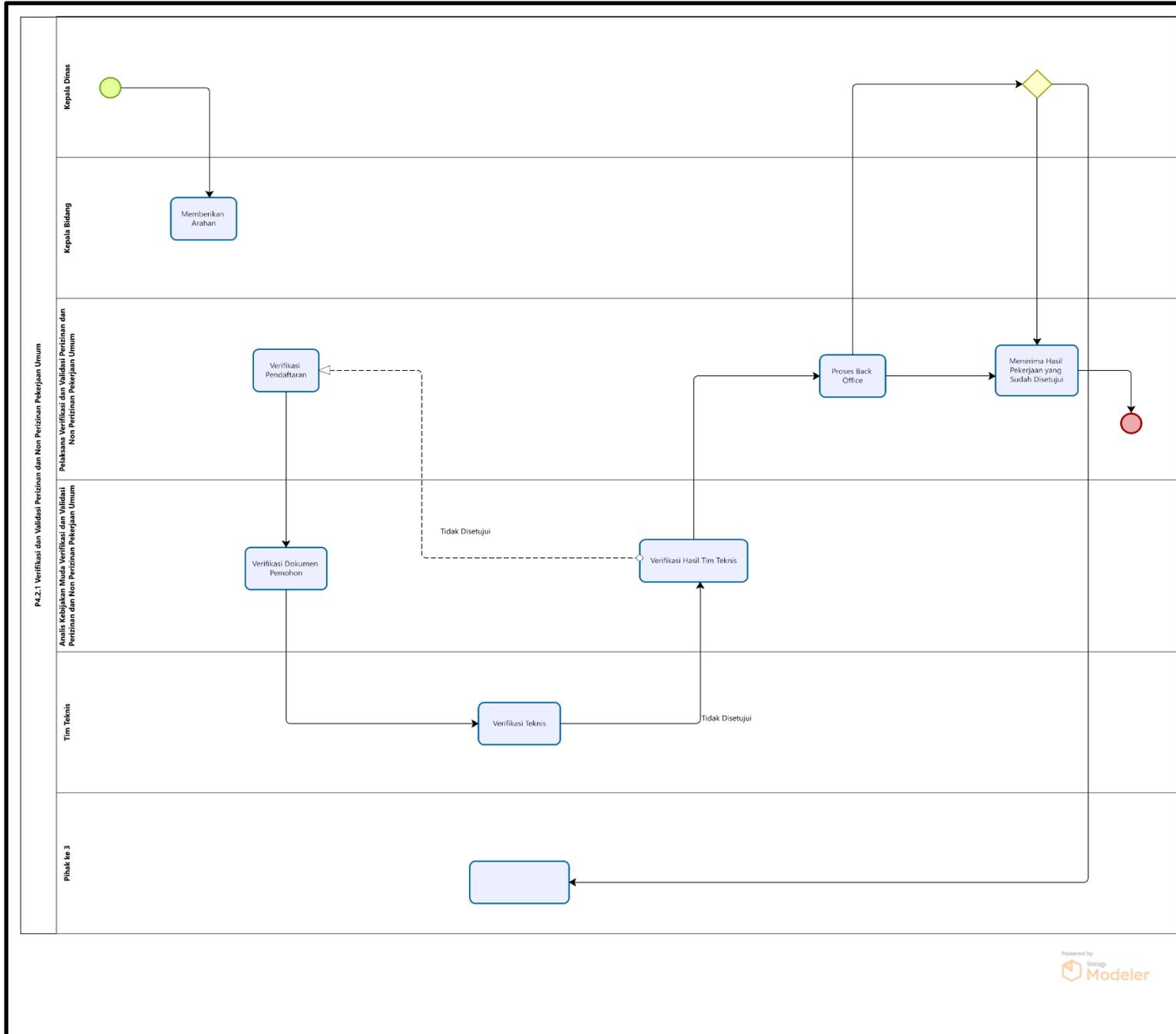
### N4.1.1 Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Eksparsosbud



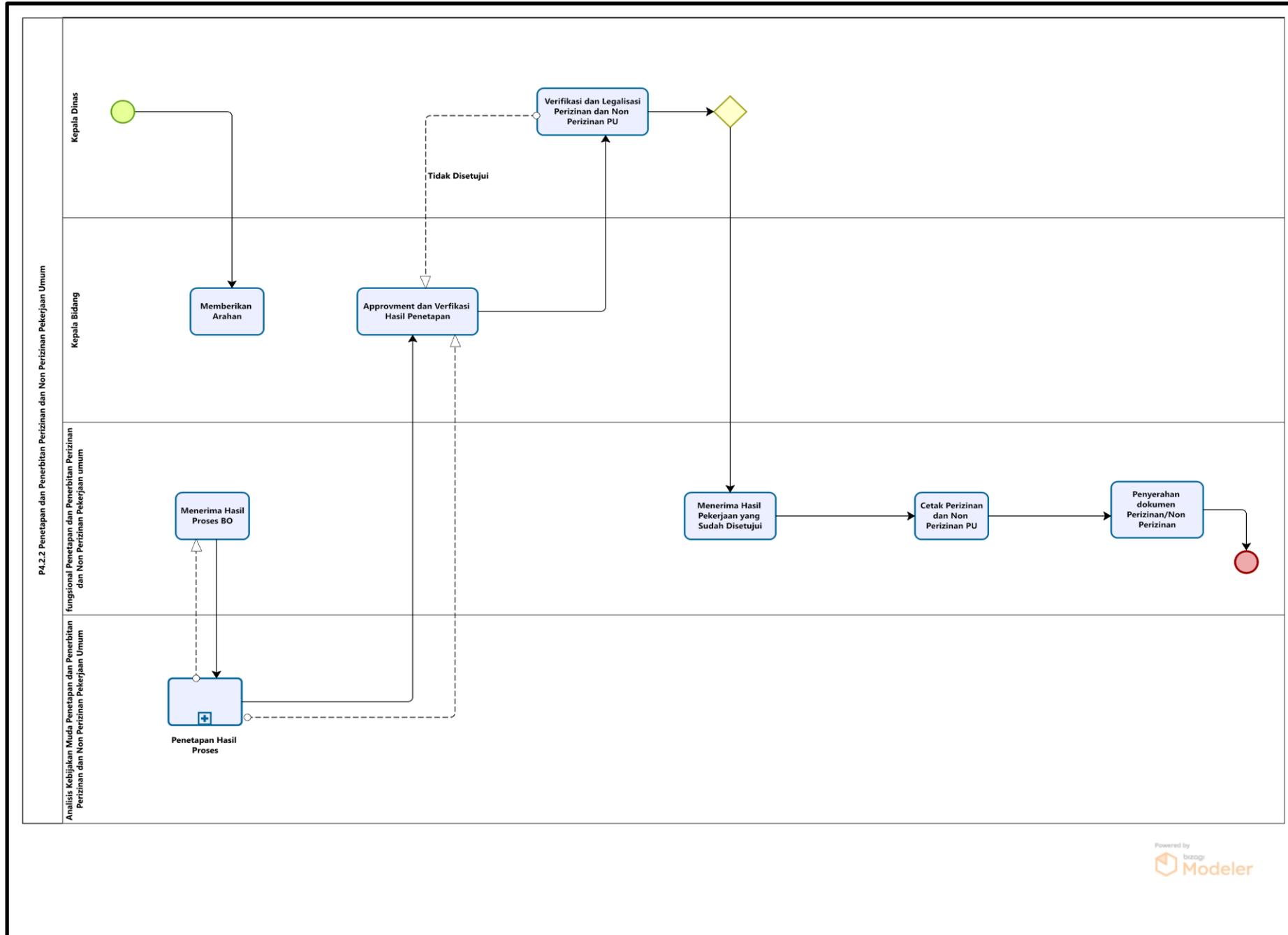
## N4.1.2 Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Eksparsosbud



## N4.2.1 Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum



## N4.2.2 Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum

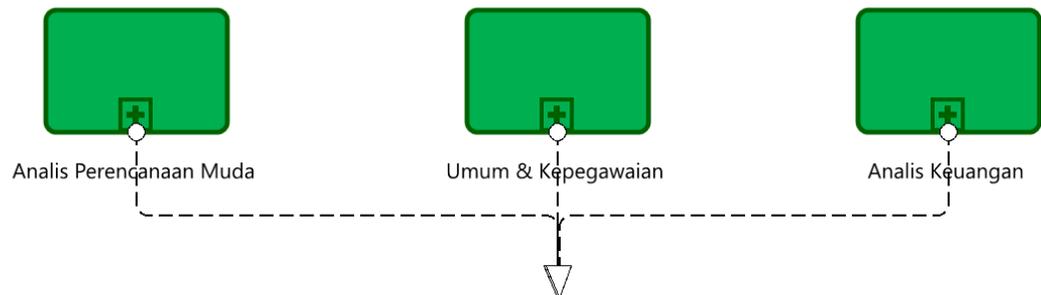


# P5 UMUM DAN KEPEGAWAIAN

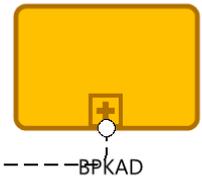


P5 Umum dan Kepegawaian





**P5.1 Penyusunan Rencana Anggaran**

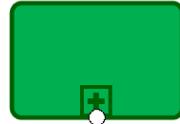




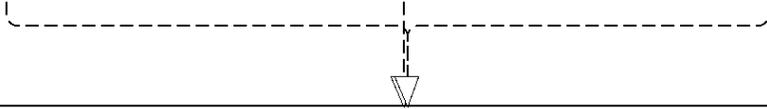
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



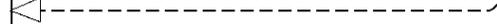
**P5. 2 Penerimaan, Pendistribusian Surat dan Kearsipan**



P5. 2 Penerimaan,  
Pendistribusian  
Surat dan Kearsipan

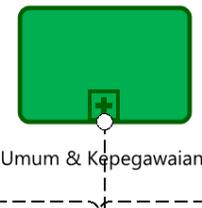


Dinas Terkait

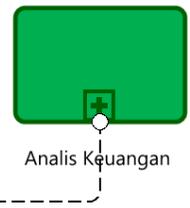




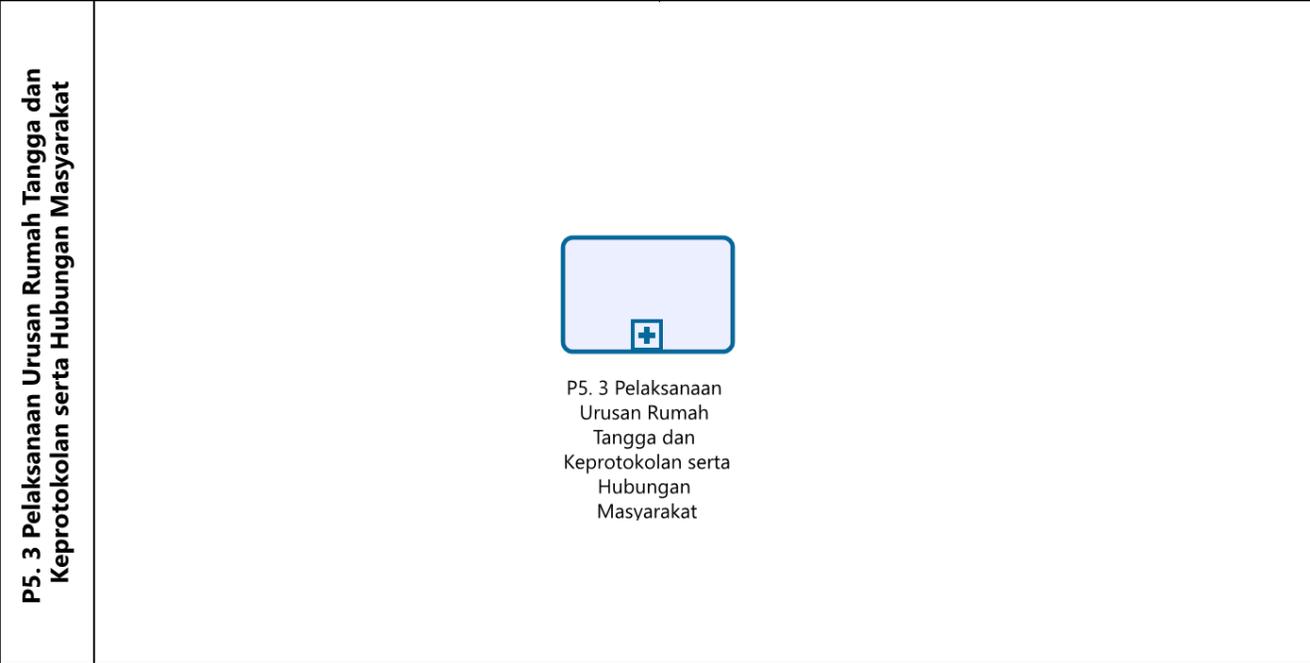
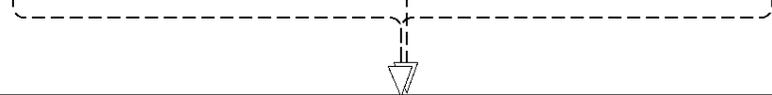
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



P5. 3 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Keprotokolan serta Hubungan Masyarakat

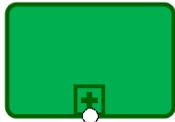


P5. 3 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Keprotokolan serta Hubungan Masyarakat

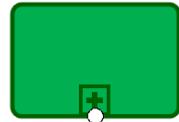


Dinas Terkait

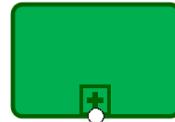




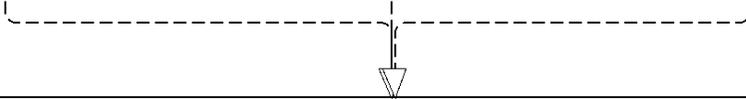
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



**P5. 4 Perencanaan Kebutuhan Kepegawaian**



P5. 4 Perencanaan Kebutuhan Kepegawaian



BKPSDM

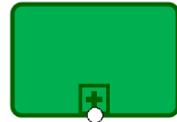




Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



P5. 5 Pelaksanaan Pengadaan, Perawatan, Pengamanan Aset, Pertanggungjawaban Barang Inventaris

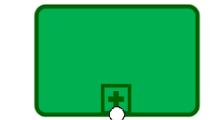


P5. 5 Pelaksanaan Pengadaan, Perawatan, Pengamanan Aset, Pertanggungjawaban Barang Inventaris

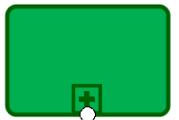


BPKAD





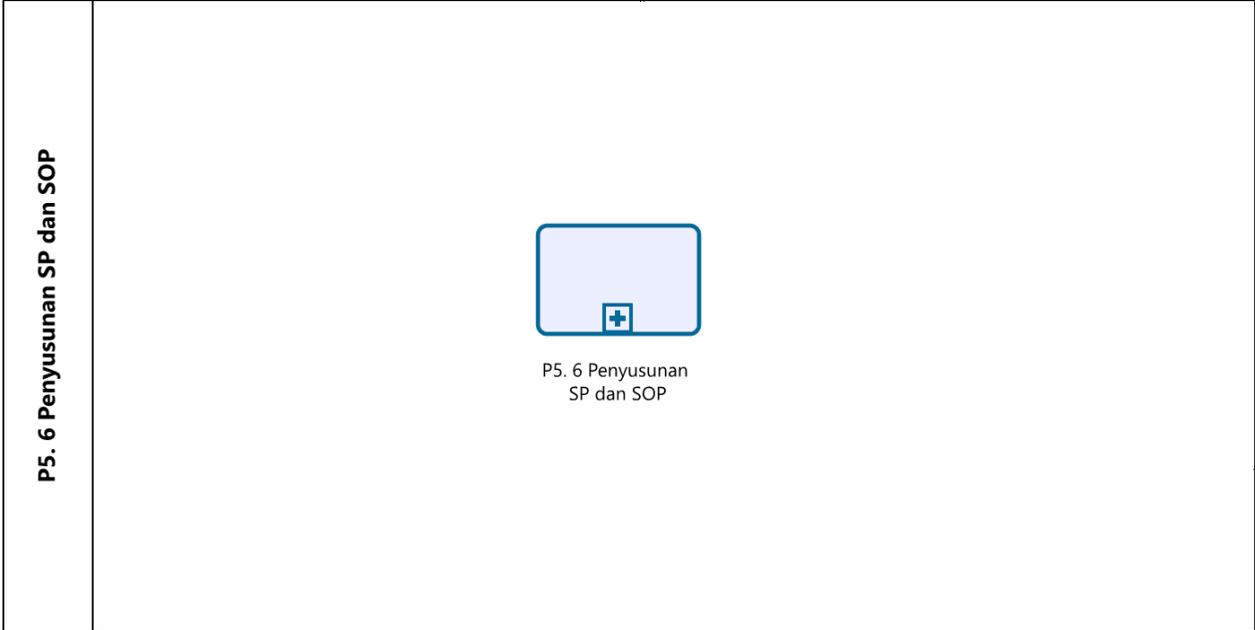
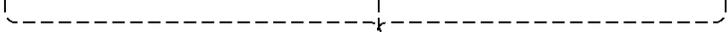
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



P5. 6 Penyusunan SP dan SOP



P5. 6 Penyusunan  
SP dan SOP

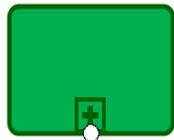


Dinas Terkait

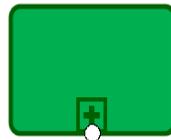




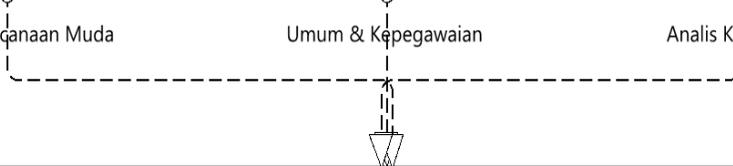
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



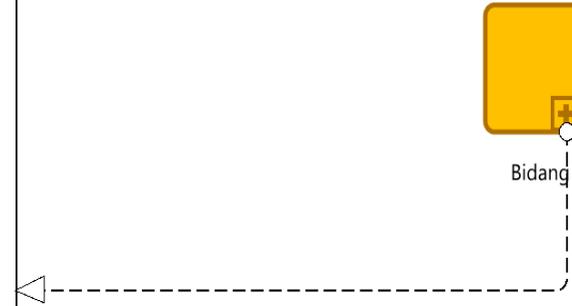
**P5. 7 Menyiapkan Evaluasi dan Pelaporan Tugas Sekretariat**



P5. 7 Menyiapkan Evaluasi dan Pelaporan Tugas Sekretariat

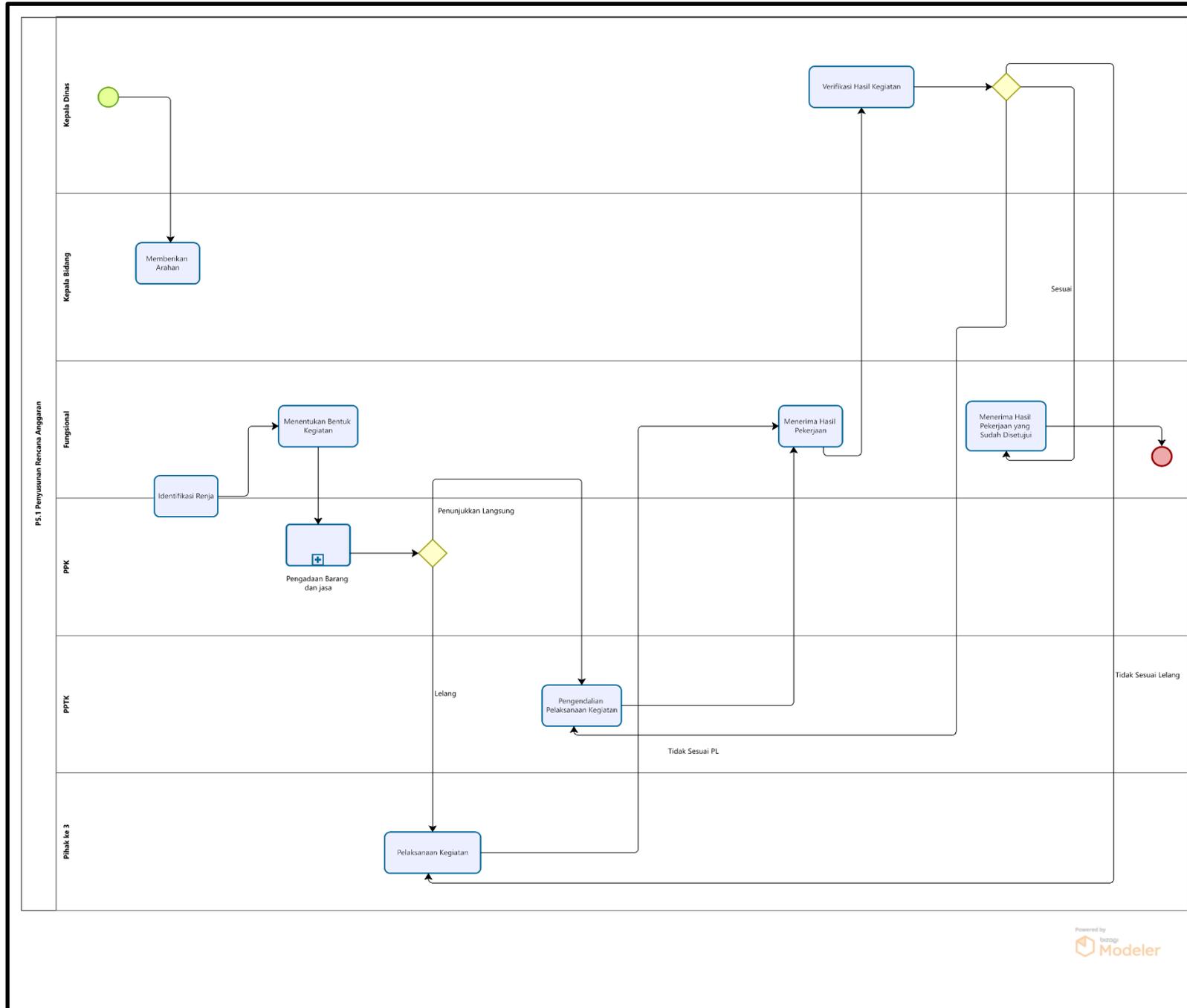


Bidang Terkait

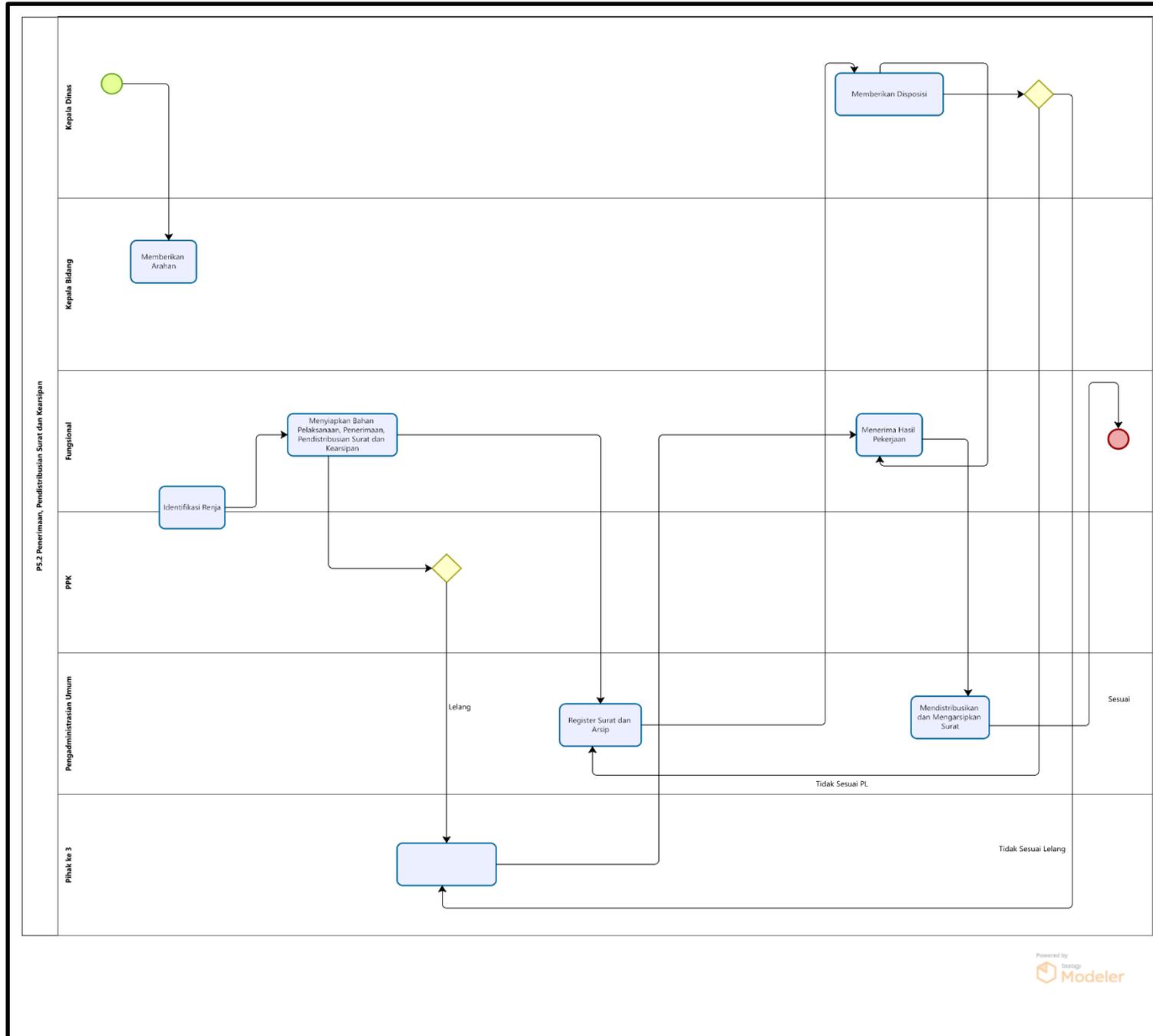


# P5 UMUM DAN KEPEGAWAIAN

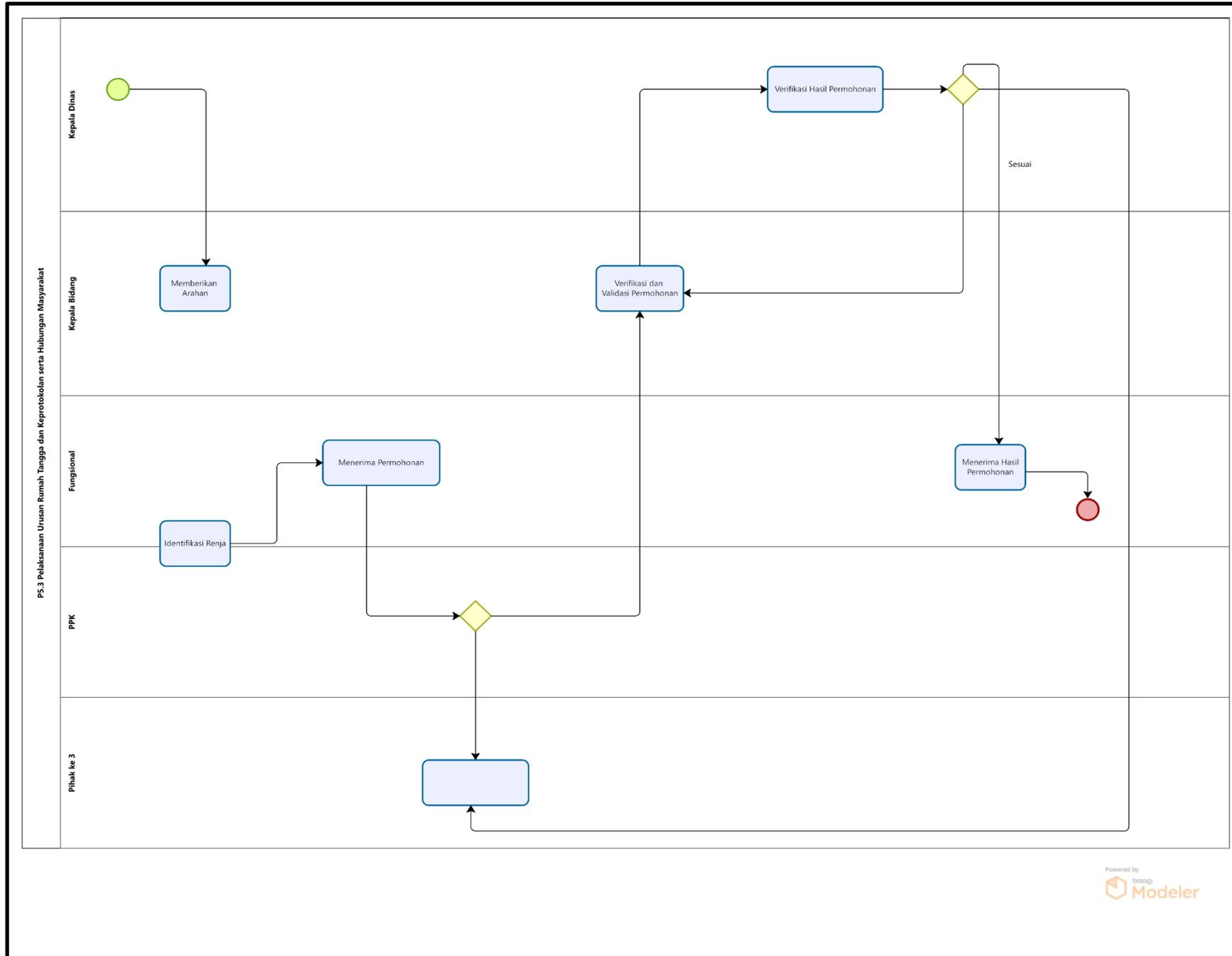
## N5.1 Penyusunan Rencana Anggaran



## N5.2 Penerimaan, Pendistribusian Surat dan Kearsipan

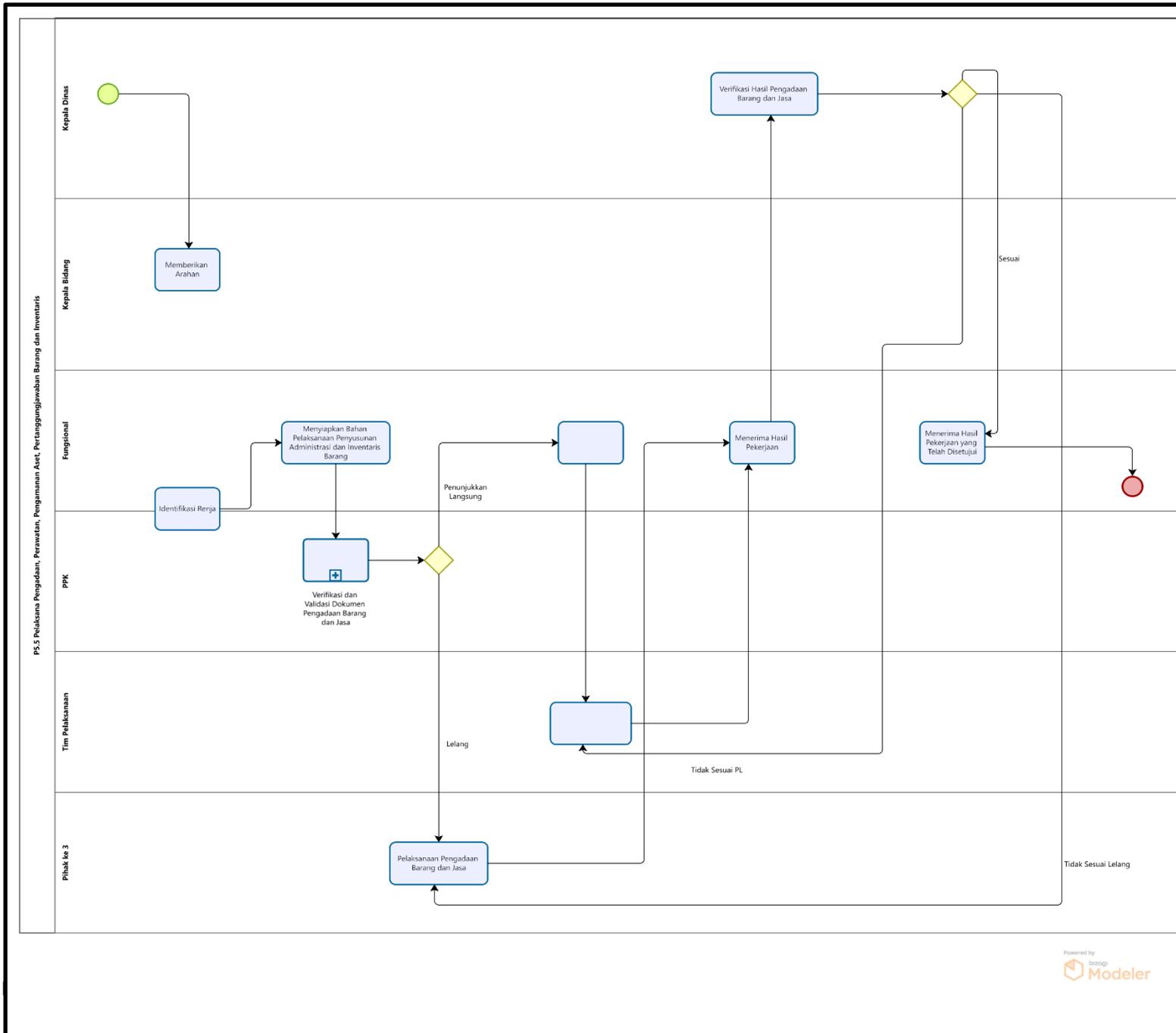


### N5.3 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Keprotokolan serta Hubungan Masyarakat

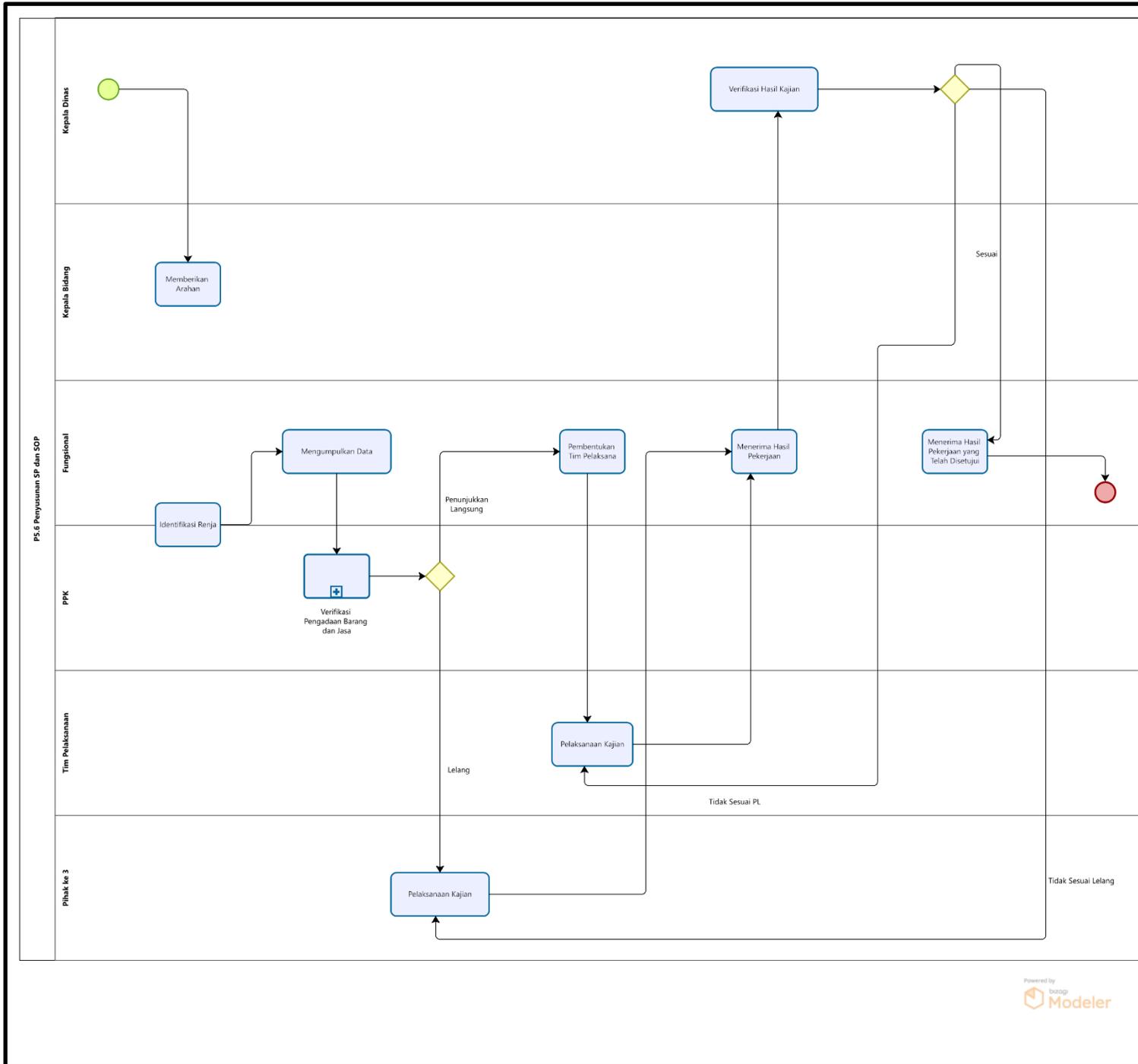




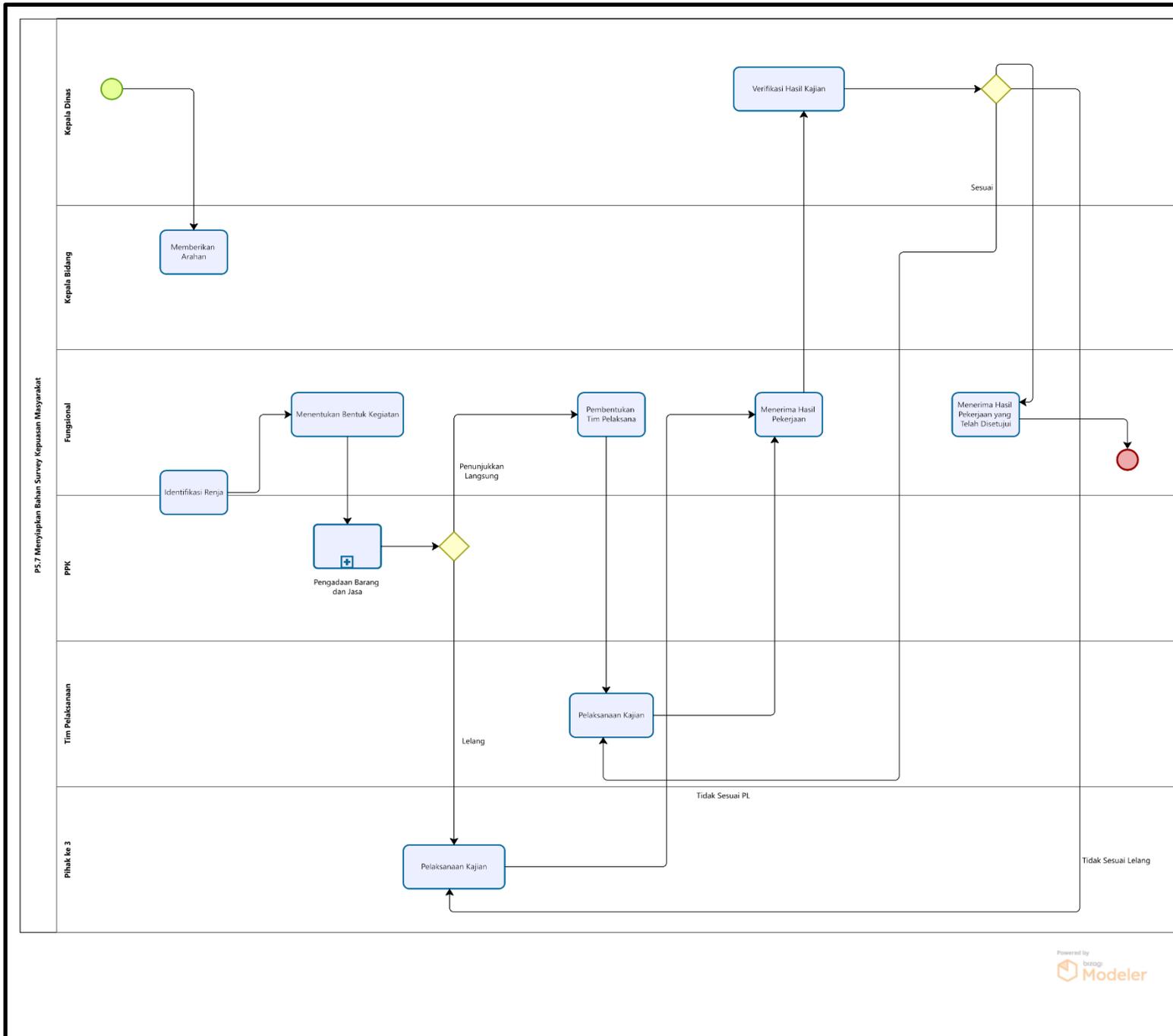
## N5.5 Pelaksana Pengadaan, Perawatan, Pengamanan Aset, Pertanggungjawaban Barang dan Inventaris



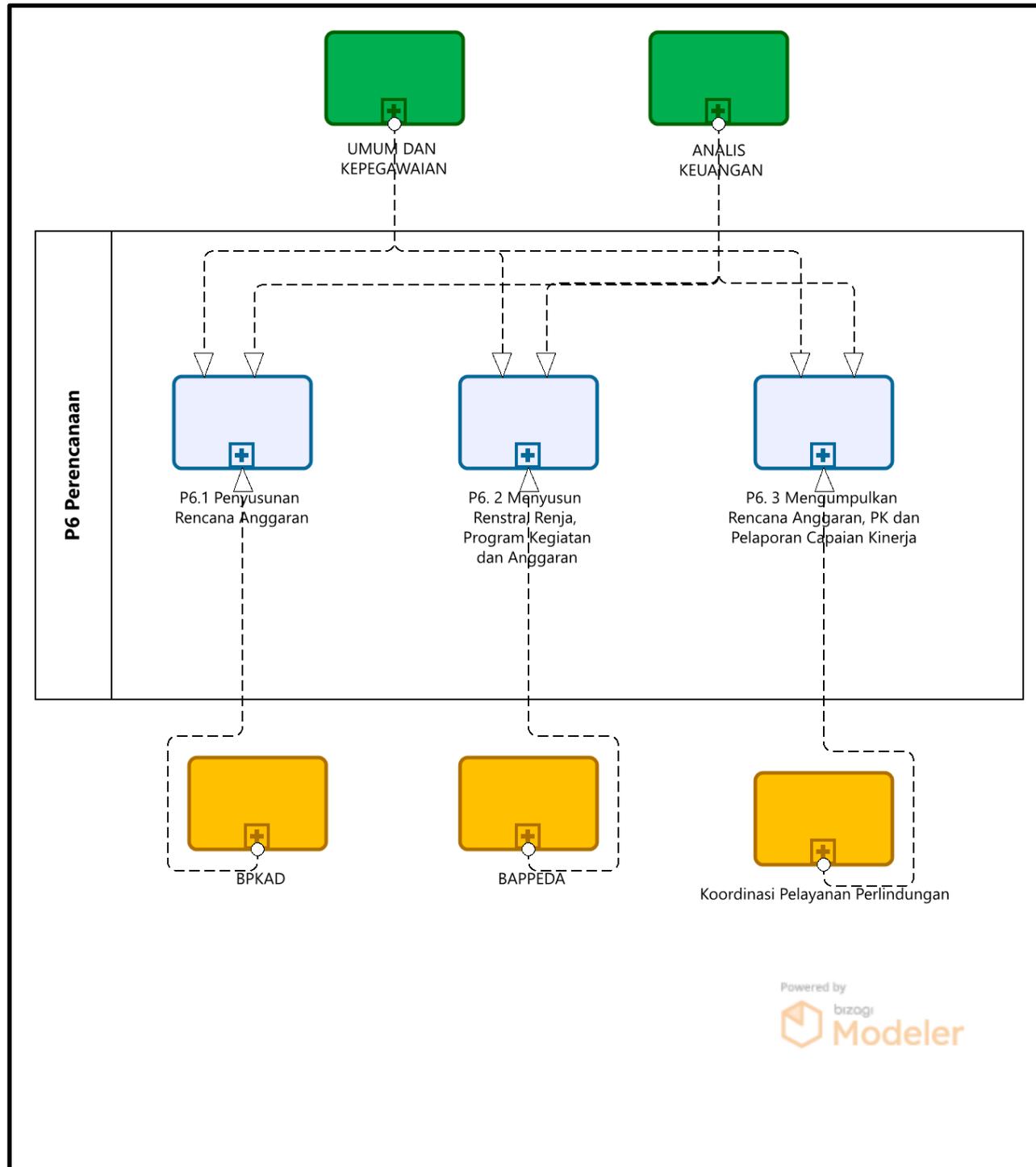
## N5.6 Penyusunan SP dan SOP

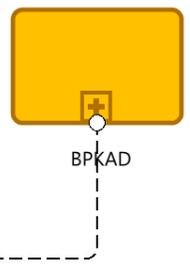
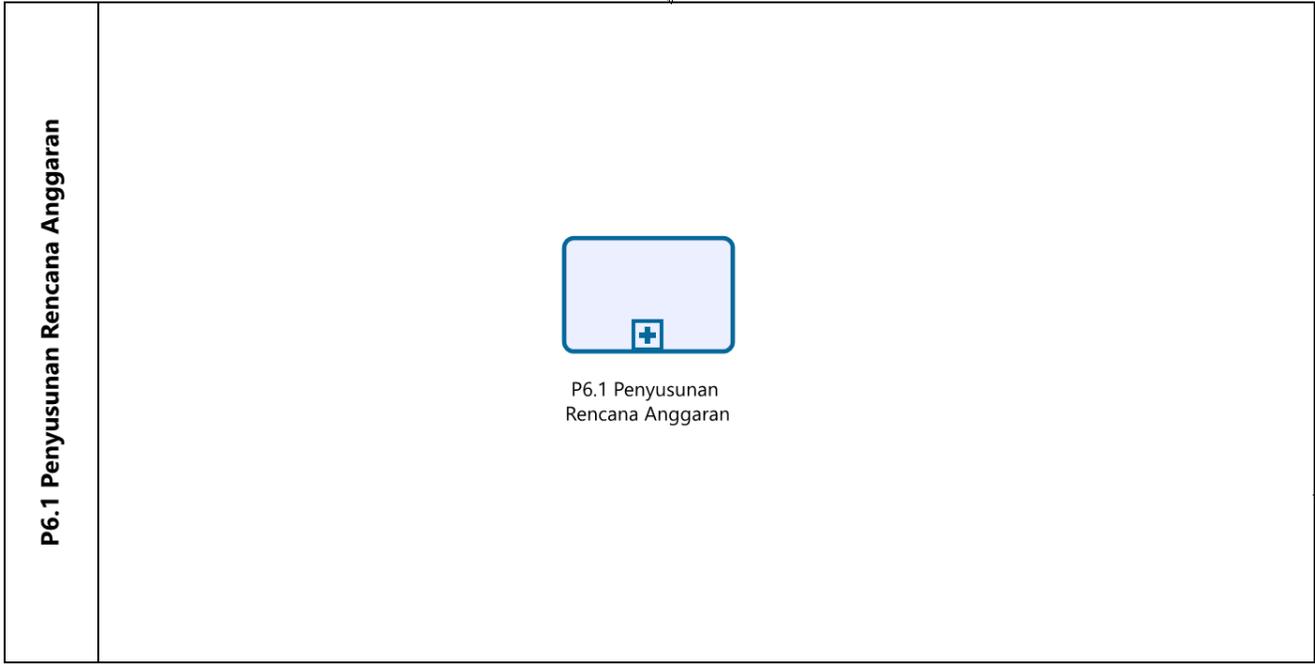
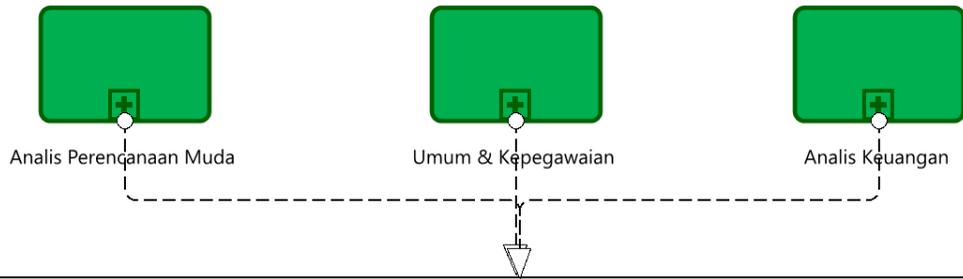


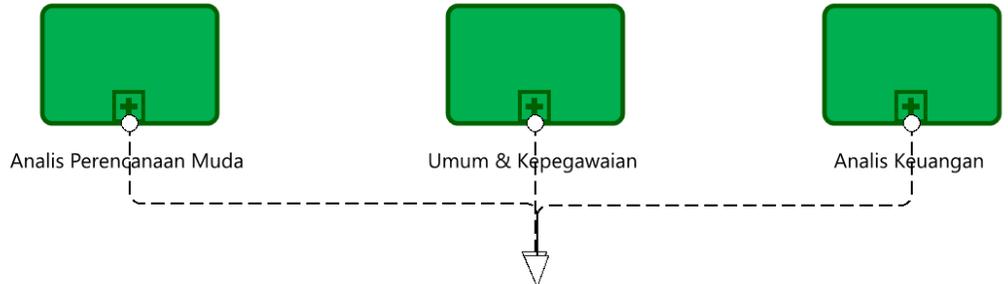
## N5.7 Menyiapkan Bahan Survey Kepuasan Masyarakat



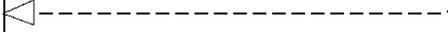
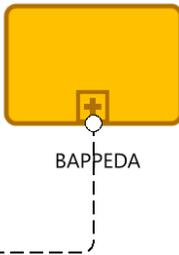
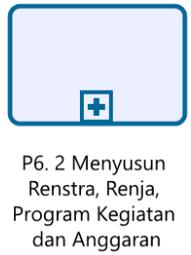
# P6 ANALIS PERENCANA MUDA







**P6. 2 Menyusun Renstra, Renja, Program Kegiatan dan Anggaran**

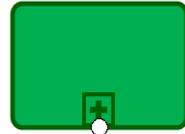




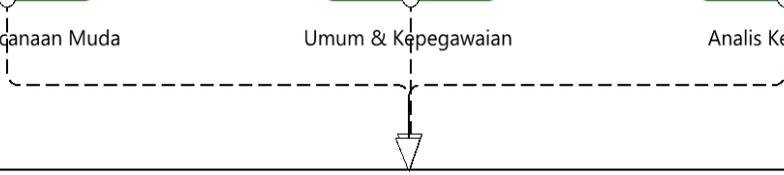
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



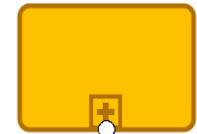
Analisis Keuangan



**P6.3 Mengumpulkan Rencana Anggaran, PK dan Pelaporan Capaian Kerja**



P6.3  
Mengumpulkan  
Rencana Anggaran,  
PK dan Pelaporan  
Capaian Kerja

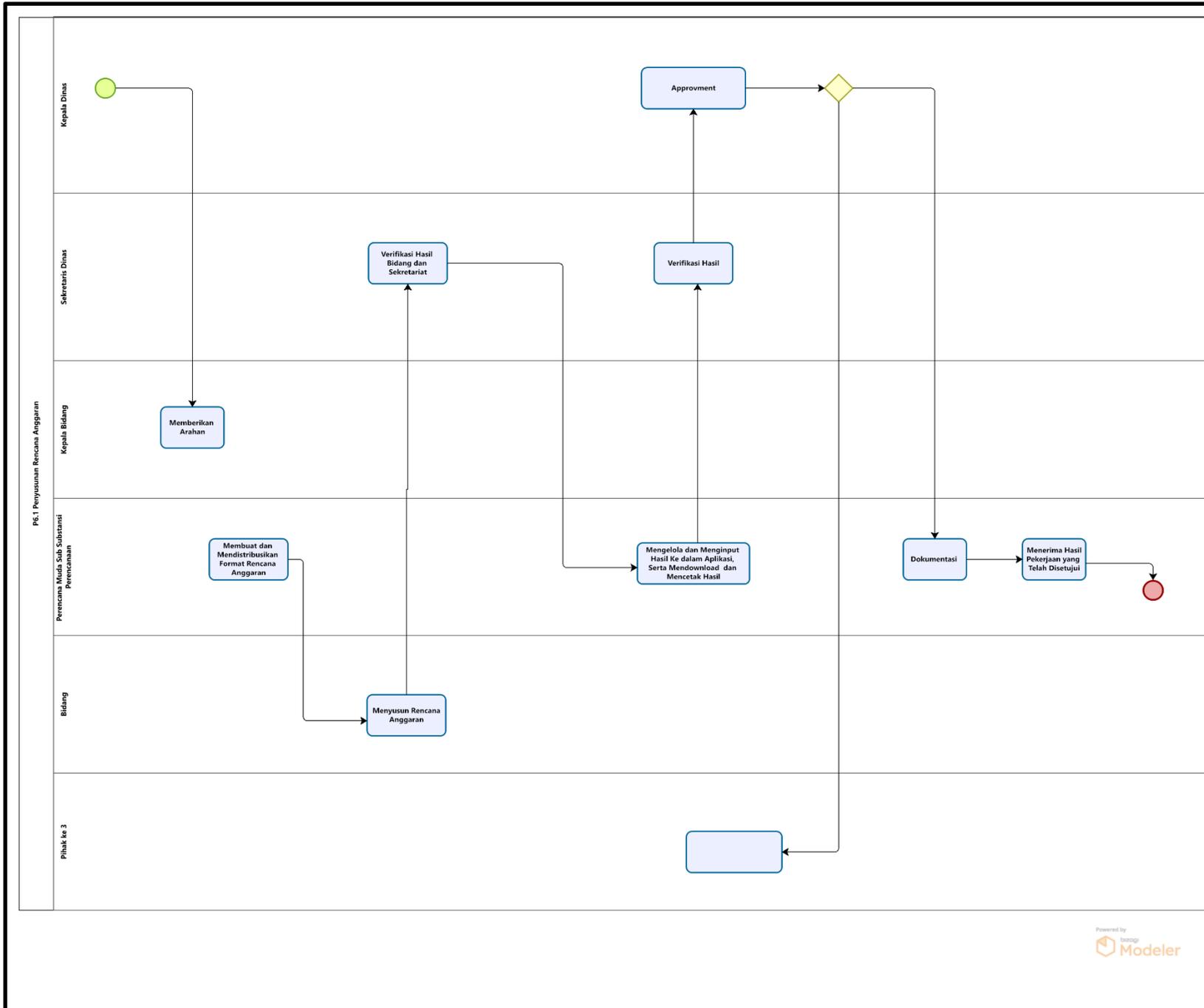


Koordinasi Pelayanan Perlindungan

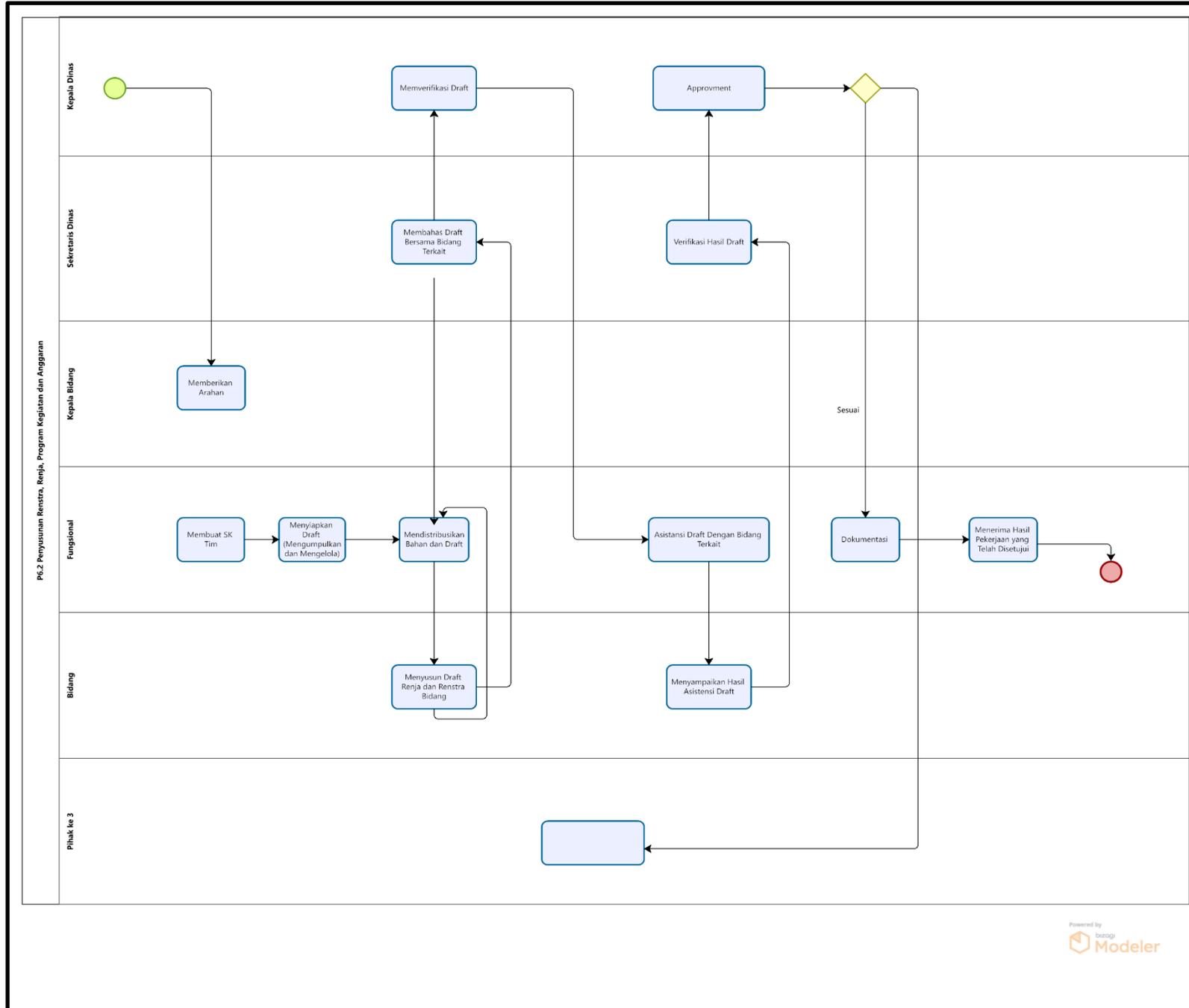


# **N6 ANALIS PERENCANA MUDA**

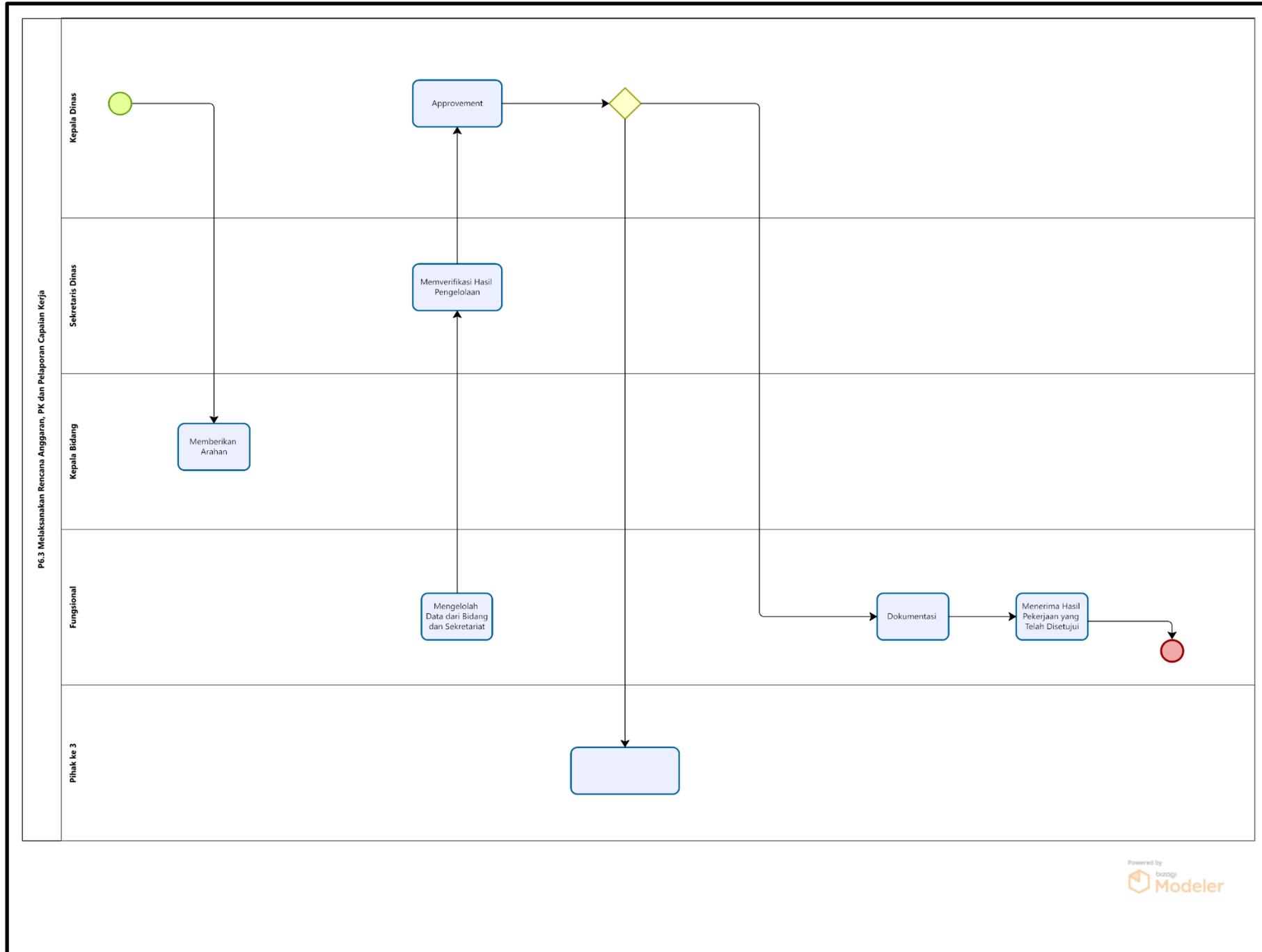
## N6.1 Penyusunan Rencana Anggaran



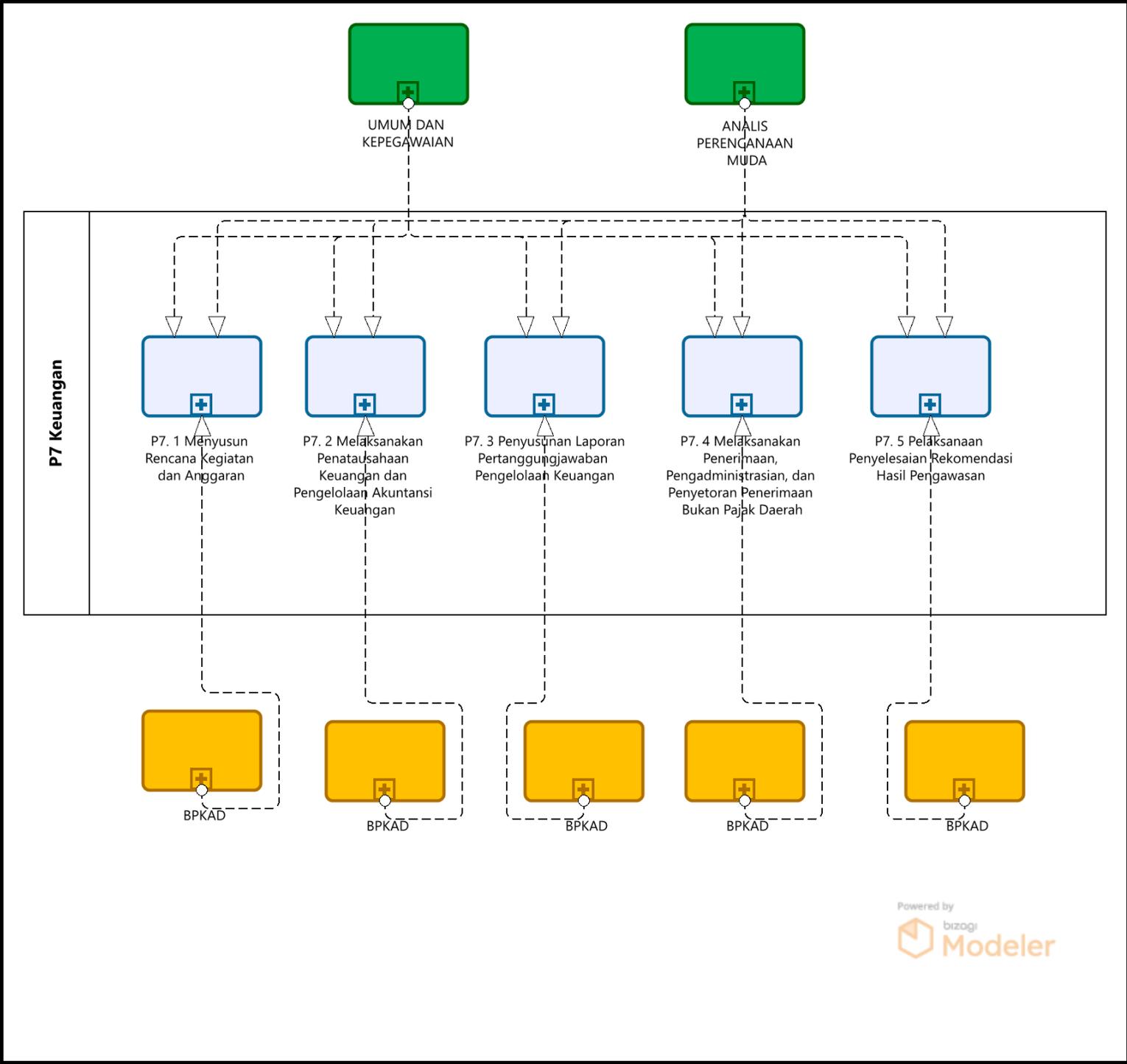
## N6.2 Penyusunan Renstra, Renja, Program Kegiatan dan Anggaran

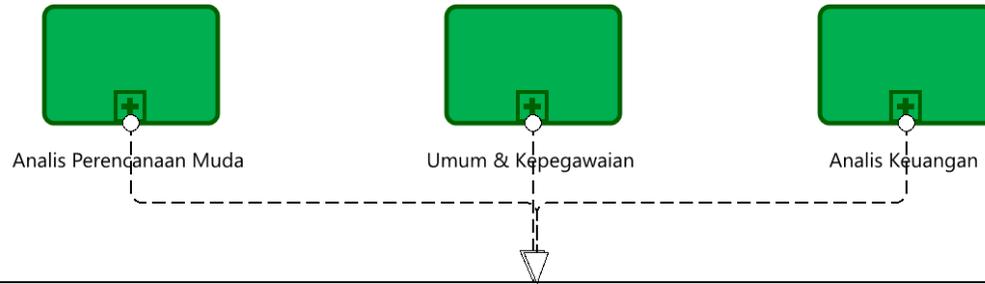


### N6.3 Melaksanakan Rencana Anggaran, PK dan Pelaporan Capaian Kerja

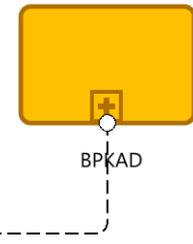


# P7 ANALIS KEUANGAN



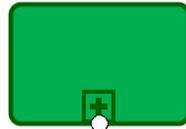


**P7. 1 Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran**





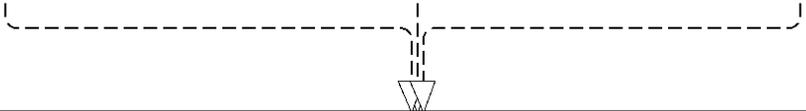
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



**P7. 2 Melaksanakan Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Akuntansi Keuangan**

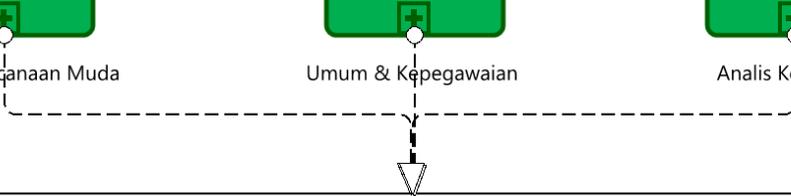
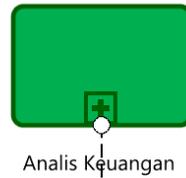
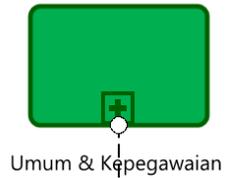


P7. 2 Melaksanakan Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Akuntansi Keuangan



BPKAD





**P7.3 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan**



P7.3 Penyusunan  
Laporan  
Pertanggungjawaban  
Pengelolaan  
Keuangan

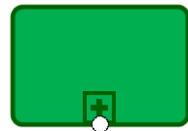


BP&AD





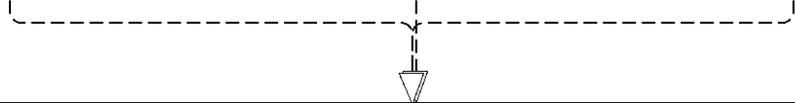
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kpegawaian



Analisis Keuangan



**P7. 4 Melaksanakan Penerimaan, Pengadministrasian, dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak Daerah**

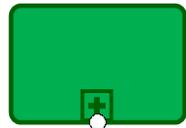


P7. 4 Melaksanakan Penerimaan, Pengadministrasian, dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak Daerah

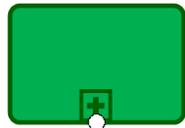


BPKAD

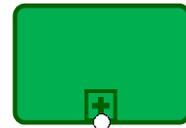




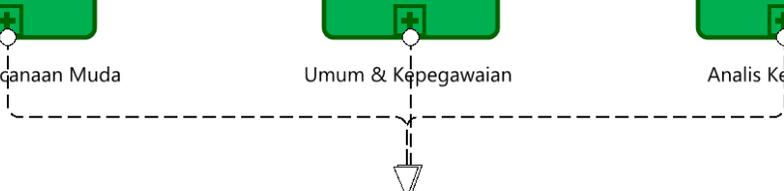
Analisis Perencanaan Muda



Umum & Kepegawaian



Analisis Keuangan



**P7. 5 Pelaksanaan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan**



P7. 5 Pelaksanaan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan

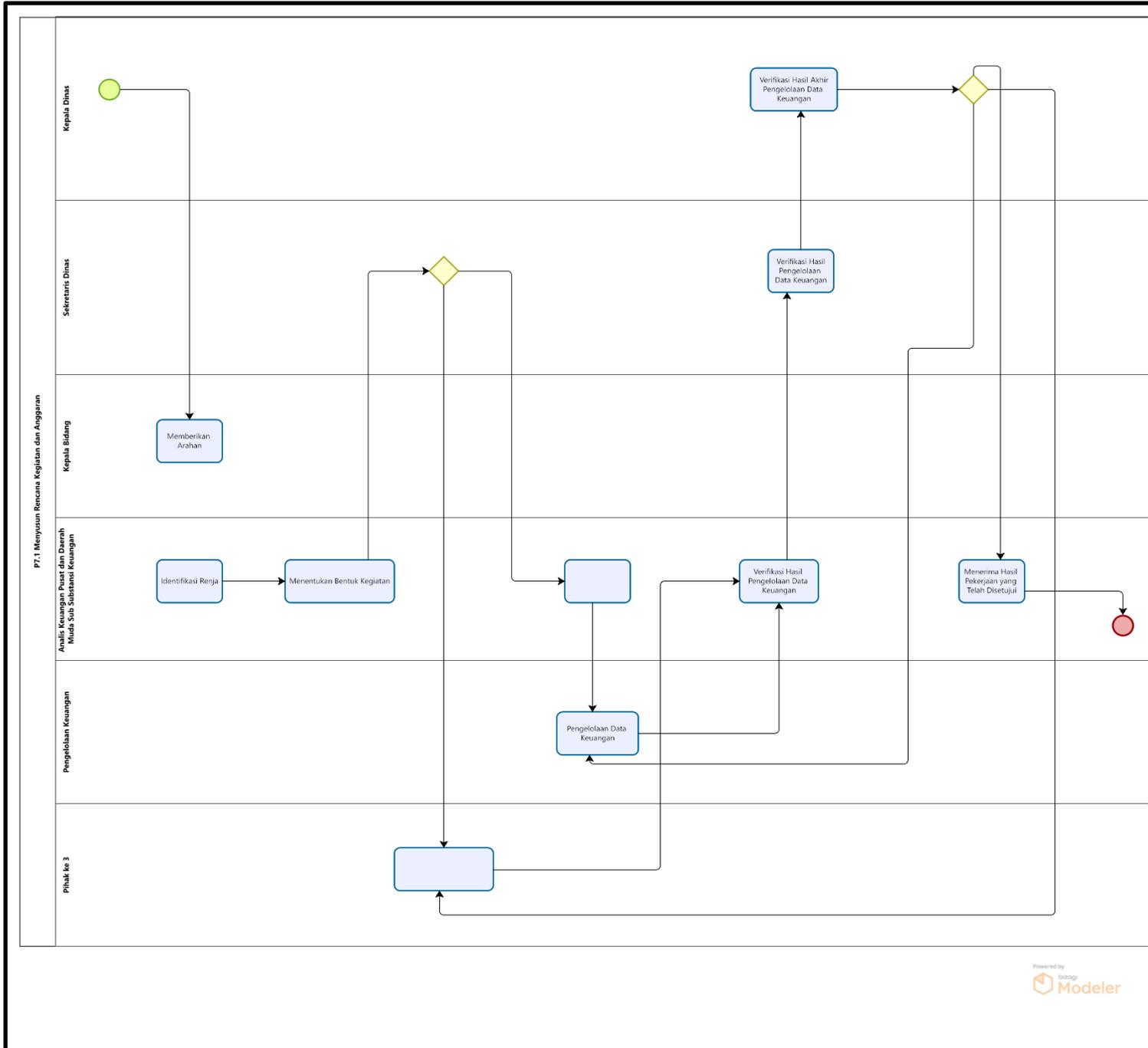


BPKAD

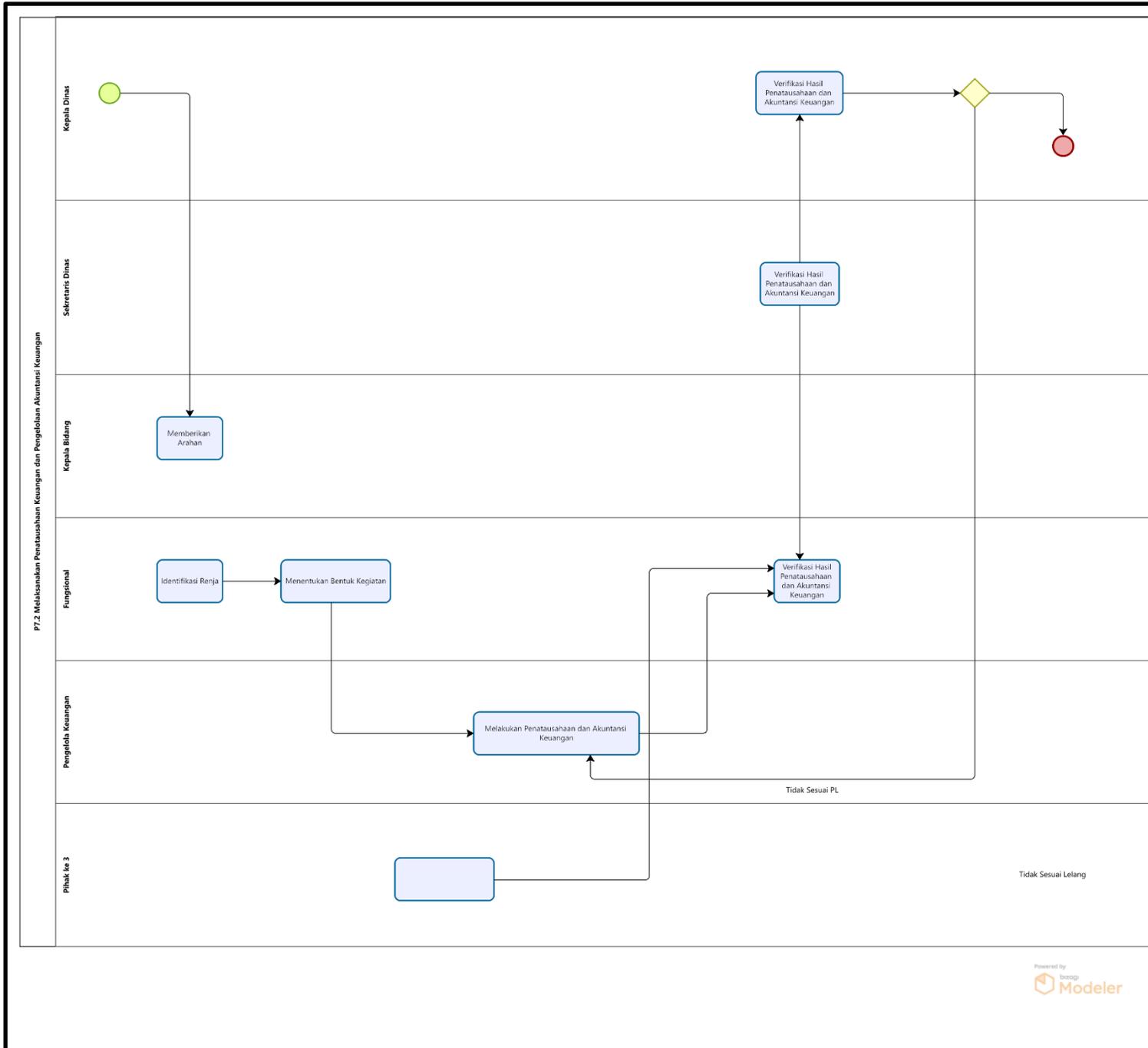


# **N7 ANALIS KEUANGAN**

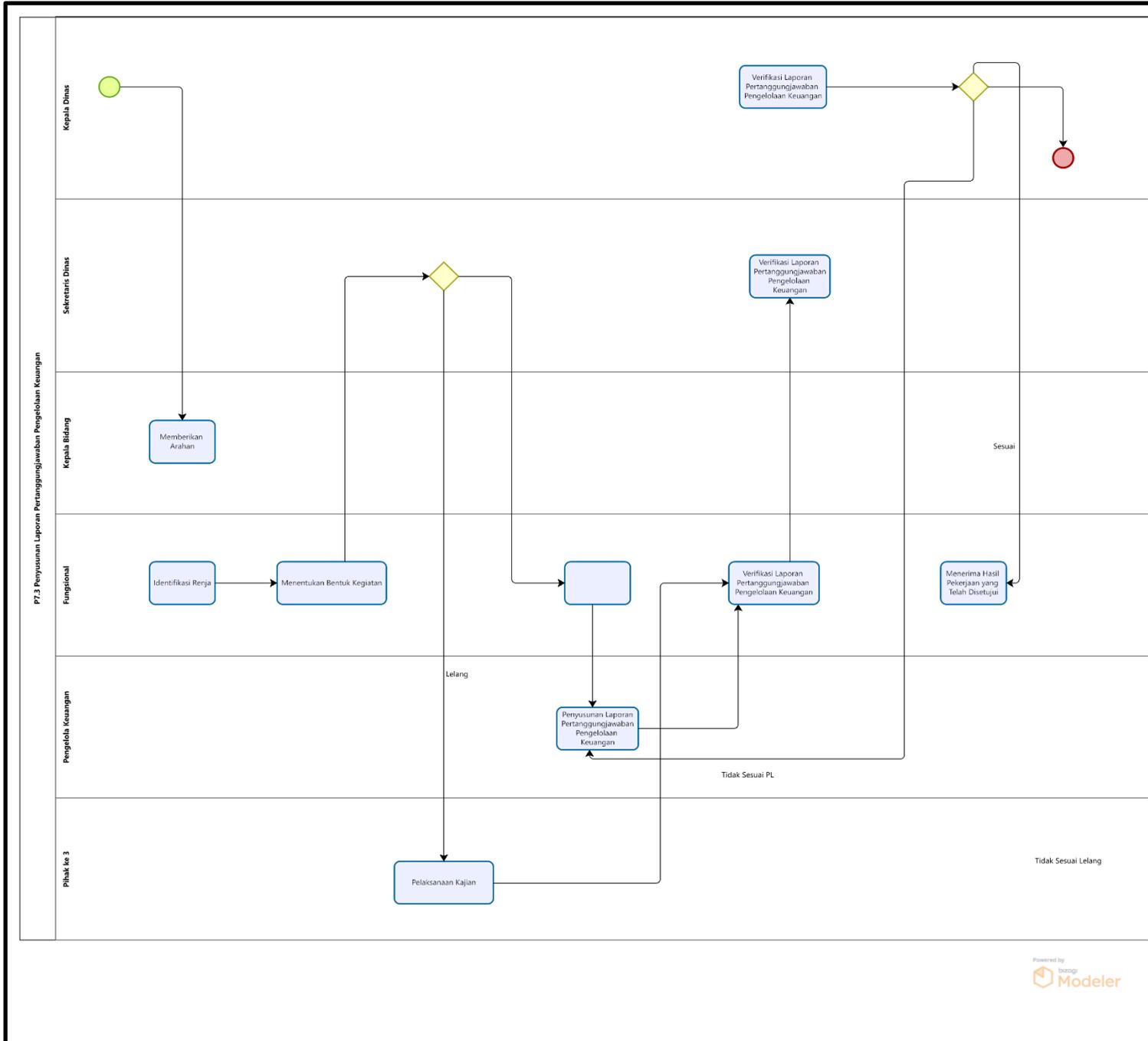
## N7.1 Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran



## N7.2 Melaksanakan Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Akuntansi Keuangan



### N7.3 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan



## N7.4 Melaksanakan Penerimaan, Pengadministrasian, dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak Daerah

